

RENSTRA BAPPEDALITBANG 2021 – 2026 *revisi*



RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN 2021

Jl. A. Yani Km. 4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Telp/Fax. (0526) 2028788/2029504

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami mengakui masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, baik karena data yang tidak komprehensif maupun dikarenakan keterbatasan kemampuan kami sebagai penyusun.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kita susun bersama ini, Amin.

Paringin, Aguatus 2021
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan,

Rakhmadi Yusni,S.Sos,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690324 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda.....	10
2.2. Tugas Pokok dan Uraian Tugas	14
2.3. Personalia	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	19
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	22
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2016- 2021	17
3.2.1 Visi	25
3.2.2 Misi	26
3.2.3 Tujuan.....	27
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34

3.4. Isu Strategis	44
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA	48
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII. PENUTUP	59
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman	Nomor
Tabel 1. Jumlah Pegawai BAPPEDA menurut golongan dan jenjang pendidikan	16
Tabel 2. Jumlah Pegawai BAPPEDA menurut Golongan Pangkat.....	17
Tabel 5. Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan	46
Tabel 6. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunannya	49
Tabel 7. Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.....	55
Tabel 8. Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan kemajuan kehidupan masyarakat di suatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi.

Sebagai bagian dari Pemerintah daerah, pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai Perangkat Daerah (PD) bergabung dengan Badan Penelitian & Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) dan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan penelitian dan Pengembangan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

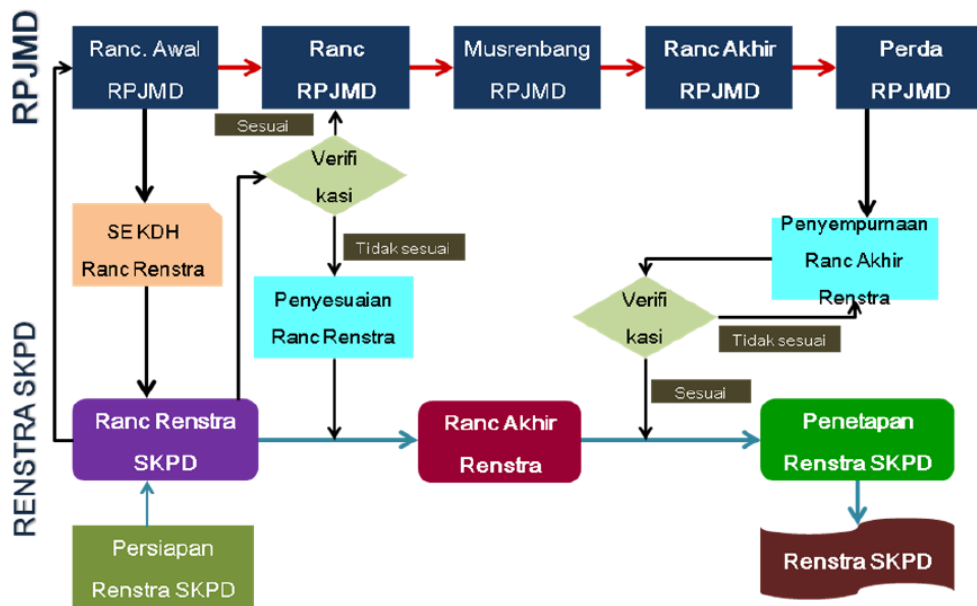
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah no 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Guna menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, BAPPEDALITBANG harus menyusun Rencana strategis (Renstra) sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan untuk menindaklanjuti ke dalam program dan kegiatan BAPPEDALITBANG selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra BAPPEDALITBANG Tahun 2021 – 2026 harus terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh BAPPEDALITBANG hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati. Selain itu dengan adanya Renstra, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran.

Proses penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappedalitbang Tahun 2021– 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan menyiapkan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tahap Perumusan/ Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

4. Penetapan Renstra SKPD

Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappedalitbang untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
- b. Sebelum Bappedalitbang mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bappedalitbang;
- c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
- d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
- e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman

unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;

- g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun atas dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008;
- 11) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah No.2 Tahun 2021;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23);

- 13) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra BAPPEDALITBANG tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.

Maksud disusunnya RENSTRA BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan 2021-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
2. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan BAPPEDALITBANG secara konsukuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya program danprioritaskegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh BAPPEDALITBANG dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2021 – 2026.
5. Untukmenjamininterciptanyaintegritas,sinkronisasiidansinergiantarbidang yang ada di BAPPEDALITBANG.
6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan Bappedalitbang dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDALITBANG 2021 – 2026 yaitu :

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup BAPPEDALITBANG.
2. Sebagai instrument pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Bappedalitbang selama 5 tahun kedepan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas public Bappedalitbang sebagai salah satu institusi pemerintah.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BAPPEDALITBANG dalam rangka fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan lintas sektor Dan wilayah;
4. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selaluberubah;
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antar berbagai stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas Perangkat Daerah kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4 Hubungan Antara Rencana Strategis Bappedalitbang Dengan Dokumen Lainnya

Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan

indikasi rencana program lima tahunan yang merupakan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara rencana strategis bappedalitbang dengan dokumen lainnya serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KAB. BALANGAN

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Bab ini mengidentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2021 – 2026, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakannya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai bappedalitbang dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappedalitbang

Bappedalitbang Kabupaten Balangan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Bappedalitbang mempunyai tugas membantubupati melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di daerah.

Untuk melaksanakan tugasnyatersebut,

Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan administrasi badan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) kabupaten Balangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22).

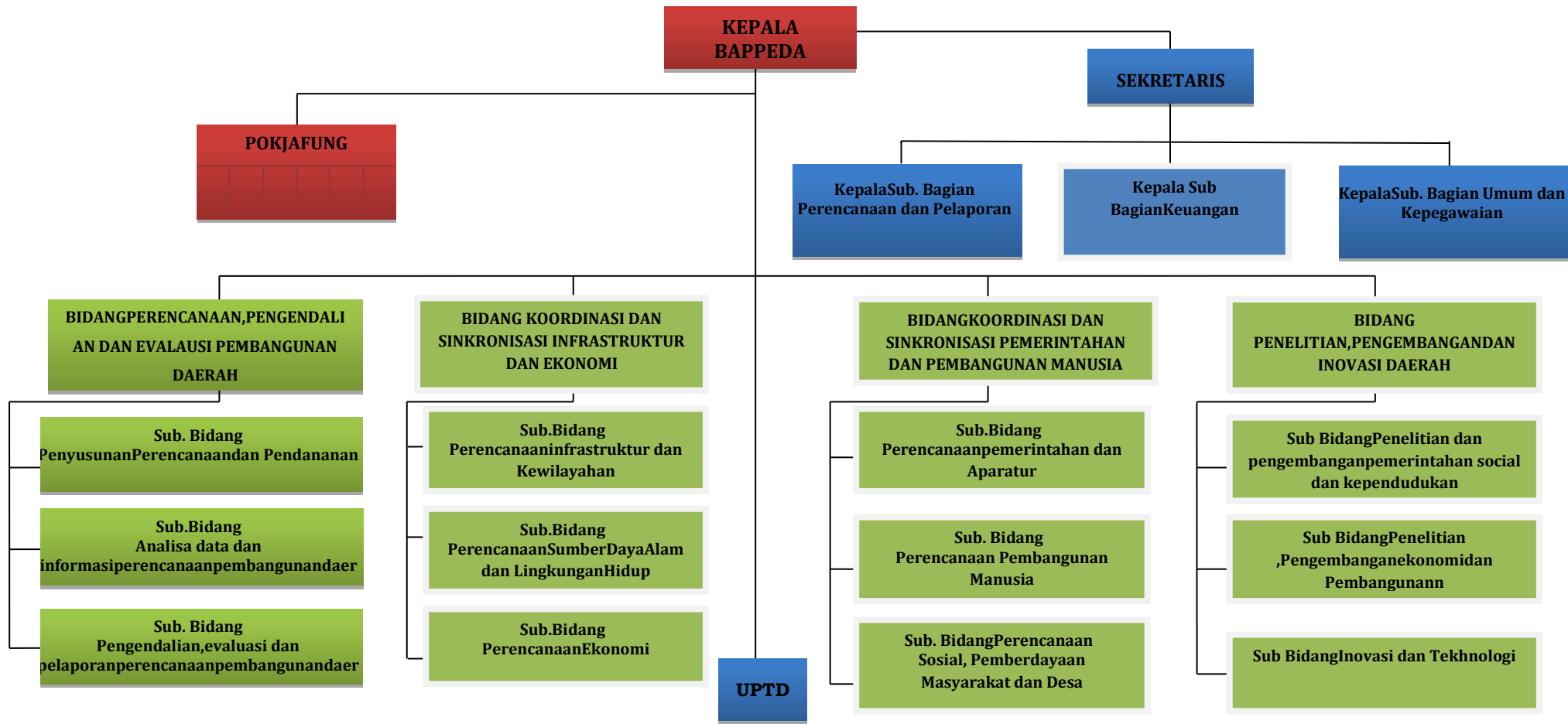
Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Kepala Badan

- a. Sekretariat
 - ❖ Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - ❖ Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari
 - ❖ Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - ❖ Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ❖ Sub Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
- e. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah
 - ❖ Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan
 - ❖ Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
 - ❖ Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
- f. Sub Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

Gambar 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN
 (Peraturan Daerah Balangan Nomor 2 Tahun 2021)



2.2 Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, selanjutnya dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan asset dan menyelenggarakan urusan umum, dan administrasi kepegawaian lingkup Bappedalitbang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.

Adapun Uraian tugas sebagai manad dimaksud adalah sebagai berikut :

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksana serta administrasi kepegawaian lingkup badan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayar gaji dan tunjangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urutan kepangkatan pegawai;

- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas penilaian kinerja pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup badan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

c. Sub Bagian Keuangan

Sub

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup badan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d. Menyiapkan bahan dan mengelola perusahaan dan akuntansi keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan ekonomi dan infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ekonomi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi; dan

e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

c. Sub Bidang Ekonomi

a. Sub Bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan Fasilitas dan supervise perencanaan pembangunan daerah terkait infrastruktur dan kewilayahan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

f. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

b. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervise perencanaan pembangunan daerah terkait perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumberdaya alam;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumberdaya alam;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan, perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi

Sub Bidang perencanaan ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervise perencanaan pembangunan daerah terkait ekonomi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ekonomi;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ekonomi;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ekonomi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervise ekonomi;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ekonomi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ekonomi;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ekonomi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

3. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina,

mengatur dan mengendalikan terkait perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan manusia.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan manusia; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.

a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

Sub Bidang Perencanaan pemerintahan dan aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan Fasilitasi dan supervise terkait pemerintahan dan aparatur.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pemerintahan dan aparatur agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan aparatur;

- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pemerintahan dan aparatur; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervise perencanaan pembangunan daerah terkait Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusertadalamrangkapencapaian target yang ditetapkan;

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pembangunan manusia;

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan manusia;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan manusia;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia;

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- f. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan manusia agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusertadalamrangkapencapaian target yang ditetapkan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pembangunan manusia; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Perencanaan ,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait penyusunan perencanaan dan pendanaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- e. Menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- g. Melaksanakan konsultasi publik;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
- i. Melaksanakan Musrenbang Kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi Musrenbang kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyusunan perencanaan dan pendanaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pendanaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. Menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
- g. Menyusun profil pembangunan daerah Kabupaten;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kerjasama daerah;
- g. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusertadalamrangkapencapaian target yang ditetapkan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatursertamengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inovasi dan teknologi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;

b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;

d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inovasi dan teknologi; dan

e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah terdiri dari :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;

b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang lembaga ketatalaksanaan;
- h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
- i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
- j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan lembaga desa;
- l. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
- m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
- n. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
- o. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang badan usahamilik desa;
- p. Mengelola data kelitbang dan peraturan;
- q. Merumuskan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;

- r. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- s. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- t. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- u. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- v. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- w. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- x. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- y. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- z. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- â. Melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- ä. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- ö. Melaksanakan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- aa. Melaksanakan penelitian dan pengembangan transmigrasi;
- bb. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- cc. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- dd. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan; dan
- ee. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan .

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
- h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- l. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- n. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- o. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- p. Melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;
- q. Melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;

- r. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. *Sub Bidang Inovasi dan Teknologi*

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inovasi dan teknologi;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi dan teknologi;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inovasi dan teknologi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
- f. Melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- g. Melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang; Fasilitas hak kekayaan intelektual;
- i. Melaksanakan perekayasaan di bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;

- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan inovasi dan teknologi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi inovasi dan teknologi;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inovasi dan teknologi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappeda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Personalia

Jumlah pegawai BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah sebanyak 32 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

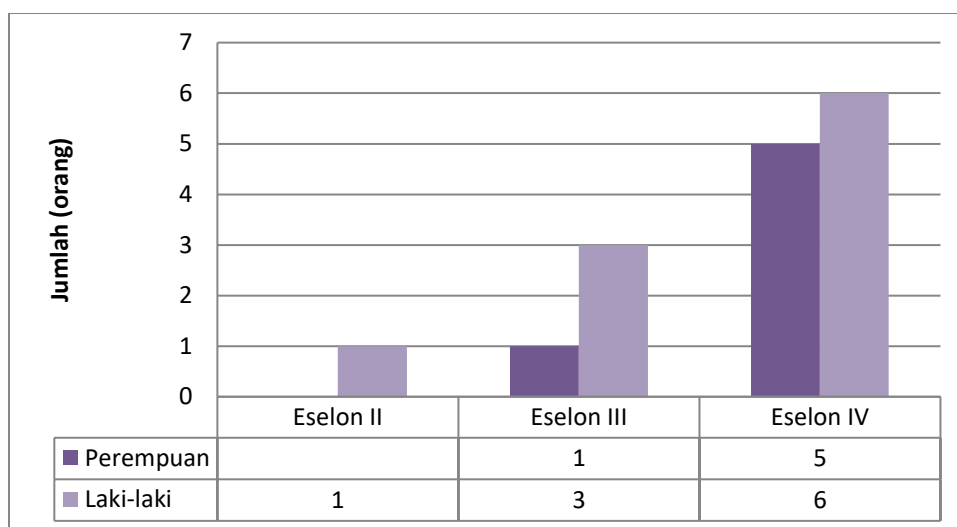
Tabel 1
Jumlah pegawai BAPPEDALITBANG menurut golongan dan jenjang pendidikan

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	-	-	-	-
4	D – 1	-	-	-	-	-
5	D – 2	-	-	-	-	-
6	D – 3	-	-	-	-	-
7	D - 4 / S – 1	-	-	-	-	-
8	S – 1	-	-	24	0	24
9	S – 2	-	-	5	3	8
10	S – 3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	29	3	32

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. yang dijelaskan pada gambar grafik berikut :

Gambar 3

Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin



Adapun Jumlah Pegawai BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan menurut Golongan Pangkat yang terbagi pada unit kerja Bappedalitbang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

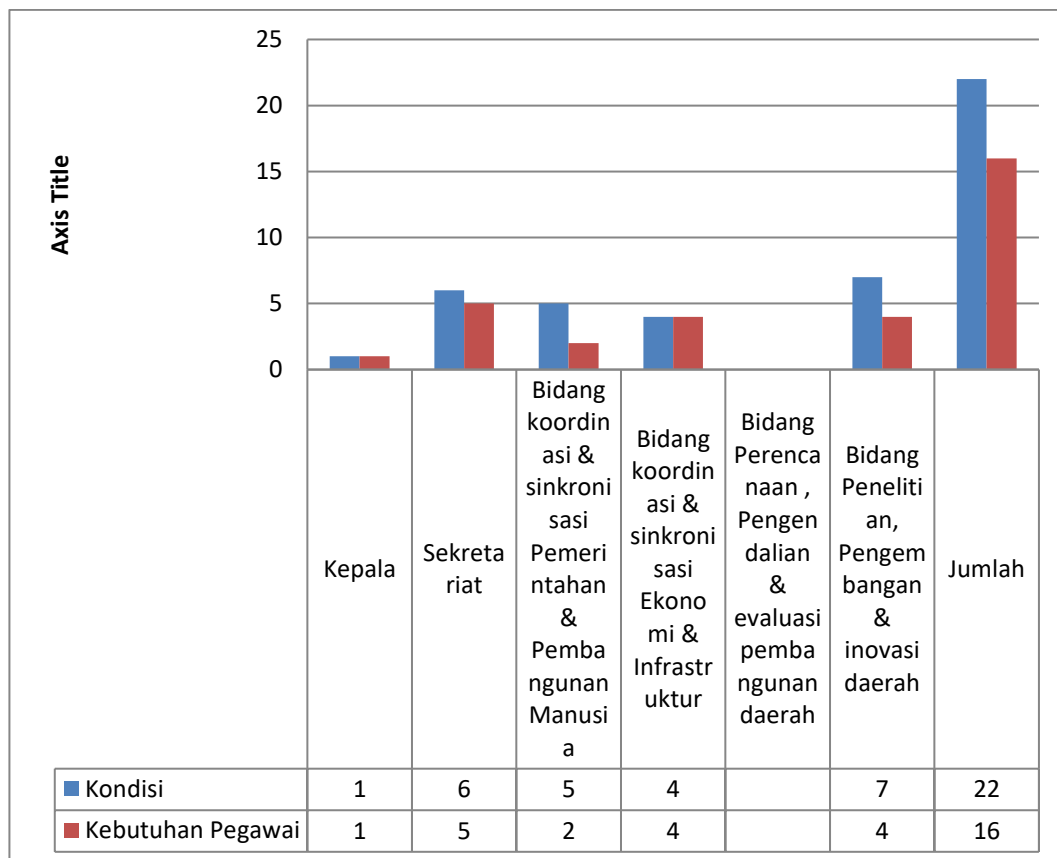
Jumlah Pegawai BAPPEDALITBANG menurut Golongan Pangkat

Unit Kerja	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala	-	-	1	1
Sekretariat	-	3	1	6
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan & Pembangunan Manusia		5	1	5
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi & Infrastruktur	1	3	-	4
Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	1	5	-	6
Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	1	1	3	5
Jumlah	5	14	3	22

Perbandingan kondisi pegawai dan kebutuhan pegawai BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan pada gambar grafik berikut menggambarkan Komposisi Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 4

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Disisi Asset, jumlah asset tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebagai berikut :

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Jenis Aset Tetap	2020 (Rp)
1	Tanah	610.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.951.483.300,00
3	Gedung dan Bangunan	8.907.549.782,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	167.889.640,00
5	Aset Tetap Lainnya	110.522.500,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(7.753.835.112,00)
Jumlah		5.994.110.110,00

Asset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Jenis Aset Tetap	2020 (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.605.178.150,00
3	Gedung dan Bangunan	3.854.358.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	314.626.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	277.351.800,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.831.303.449,00)
Jumlah		4.220.210.501,00

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dimasa lalu (2016 - 2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Tabel T-C.23

Review Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Pengembangan Daerah

Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
C	IKU SKPD																		
1	Prosentase pencapaian target RPJMD	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	50%	74%	82%	93%	106%	70.87%	98.36%	102.50%	109.52%	117.87%
2	Prosentase tingkat keterediaan data & informasi pembangunan daerah	-	-	-	30%	35%	45%	55%	60%	34.64%	46.50%	44%	40.50%	53.92%	115.47%	132.86%	97.78%	73.64%	89.87%
3	Prosentase tingkat konsistensi antar perencanaan tahun terhadap perencanaan jangka menengah.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0	97%	98.77%	100%	100%	0.00%	97.00%	98.77%	100.00%	100.00%
4	Prosentase capaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi & fisik prasarana	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	0	75%	84.60%	93.45%	93.15%	0.00%	100.00%	105.75%	109.94%	103.50%
5	Prosentase capaian program prioritas target RPJMD bidang sosial & budaya	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	0%	73%	83%	105.10%	99.56%	0.00%	97.33%	103.26%	123.65%	110.62%
6	Program Pelayanan administrasi perkantoran									83.80%	88.74%	86,15%	100%	92,01%	83.81%	88.74%	86.16%	95.13%	92.01%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										92,13%	40,20%	79,66 %	82,83 %	88,51 %	92,13%	40,20%	79,66 %	82,84%	88,51%
Program peningkatan disiplin aparatur										100%	77,71%	100%	87,27 %	97,36 %	100,00 %	77,71%	100,00 %	87,27%	97,36%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										64,55%	96,58%	95%	98,19 %	89,59 %	64,55%	96,58%	95,00 %	98,19%	89,59%
Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan										100%	97,70%	76,44 %	81,16 %	93,69 %	99,72%	97,70%	76,45 %	81,16%	93,69%
Program Pengembangan data/informasi										100%	98,81%	87,16 %	90,58 %	98,93 %	94,11%	98,81%	87,16 %	90,58%	98,93%
Program Kerjasama Pembangunan										100%	92,21%	-	-	-	89,89%	92,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Program pengembangan data/informasi/statistika daerah										100%	-	-	-	-	93,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perencanaan Tata Ruang										100%	-	-	-	-	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pemanfaatan Ruang										100%	-	-	-	-	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang										95,22%	-	-	-	-	95,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									96,32%	32,73%	87,47 %	-	-	96,33%	32,73%	87,47 %	0,00%	0,00%
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cephattumbuh									96,45%	84,83%	#VAL UE!	-	-	96,45%	84,83%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program Perencanaan Pengembangan Kota kotamenengah dan besar									86,77%	-	-	-	-	86,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program peningkatankapasia kelembagaanperencanaanpembangunan daerah									66,22%	99,18%	81,64 %	97,50 %	85,39 %	66,22%	99,18%	81,64 %	97,50%	85,39%
	Program perencanaanpembangunan daerah									91,11%	94,81%	91,67 %	97,43 %	93,93 %	91,11%	94,81%	91,68 %	97,43%	93,93%
	Program perencanaanpembangunan ekonomi									74,56%	93,65%				74,56%	93,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program PerencanaanPembangunan SosialBudaya									89,54%	89,65%	71,35 %	83,70 %	83,67 %	89,55%	89,65%	71,35 %	83,70%	83,67%
	Program PerencanaanPerekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan									-	-	77,06 %	88,35 %	89,13 %	0,00%	0,00%	77,06 %	88,36%	89,13%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi									96,52%	88,75%	93,75 %	97,93 %	98,63 %	96,53%	88,75%	93,75 %	97,93%	98,63%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

	Program konservaisumberdayakebunraya											98,11 %	96,43 %	99,44 %	0.00%	0.00%	98.11 %	96.43%	99.44%
	Program penelitian dan pengembangandaerahBidangSosial, Ekonomi dan emerintahan											87,86 %	93,47 %	99,59 %	0.00%	0.00%	87.86 %	93.47%	99.59%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Tabel T-C.24
**Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Balangan**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan administrasi perkantoran	1,624,852,350	1,657,878,500	1,617,373,500	1,811,801,325	1,187,692,600	1,361,730,989	1,471,251,886	1,393,504,208	1,811,801,325	1,092,788,525	83.81%	88.74%	86.16%	95.13%	92.01%	1,598,460,990	1,426,215,387
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,332,938,000	443,450,000	632,000,000	720,515,000	818,845,000	1,227,985,850	178,253,550	503,475,491	596,854,750	724,781,950	92.13%	40.20%	79.66%	82.84%	88.51%	789,549,600	646,270,318
Program peningkatan disiplin aparatur	41,400,000	24,450,000	25,100,000	27,500,000	65,700,000	41,400,000	19,000,000	25,100,000	24,000,000	63,963,637	100.00%	77.71%	100.00%	87.27%	97.36%	36,830,000	34,692,727
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	243,000,000	158,000,000	144,000,000	220,000,000	285,000,000	156,867,000	152,591,626	136,800,000	216,010,041	255,343,570	64.55%	96.58%	95.00%	98.19%	89.59%	210,000,000	183,522,447

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program peningkatan pengembangan sistem pencapaian kinerja dan keuangan	122,010,000	104,400,000	90,475,000	90,625,000	86,635,000	122,010,000	102,000,000	69,163,750	73,550,000	81,165,000	99.72%	97.70%	76.45%	81.16%	93.69%	98,897,000	89,577,750
Urusan Perencanaan																-	-
Program Pengembangan data/informasi	251,301,910	275,300,000	343,740,000	767,047,200	762,235,200	251,301,910	272,035,000	299,595,000	694,815,950	754,050,000	94.11%	98.81%	87.16%	90.58%	98.93%	483,070,480	454,359,572
Program Kerjasama Pembangunan	358,423,600	362,450,000	-	-	-	358,423,600	334,212,241	-	-	-	89.89%	92.21%	0.00%	0.00%	0.00%	152,240,000	138,527,168
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	68,995,800	-	-	-	-	68,995,800	-	-	-	-	93.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,789,000	13,799,160
Program Perencanaan Tata Ruang	367,688,000	-	-	-	-	367,688,000	-	-	-	-	95.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77,370,000	73,537,600
Program Pemanfaatan Ruang	178,753,000	-	-	-	-	178,753,000	-	-	-	-	96.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37,020,000	35,750,600

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program PengendalianPemanfaatanRuang	171,930,000	-	-	-	-	163,713,200	-	-	-	-	95.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34,386,000	32,742,640
Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah	158,680,000	154,950,000	59,235,000	-	-	152,855,000	50,710,700	51,815,000	-	-	96.33%	32.73%	87.47%	0.00%	0.00%	74,573,000	51,076,140
Program PerencanaanPengembanganWilayah Strategis dan cepattumbuh	182,450,000	160,755,000	252,180,000	-	-	175,980,000	136,369,000	-	-	-	96.45%	84.83%	0.00%	0.00%	0.00%	119,077,000	62,469,800
Program PerencanaanPengembangan Kota kotamenengah dan besar	881,045,000	-	-	-	-	764,455,687	-	-	-	-	86.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	176,209,000	152,891,137

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	965,895,150	425,825,000	1,008,547,500	905,941,000	1,023,178,605	932,366,407	377,928,500	945,468,195	887,165,322	1,009,113,298	96.53%	88.75%	93.75%	97.93%	98.63%	865,877,451	830,408,344
Program konservaisumberdayakebunraya	-	-	832,099,000	2,055,909,000	495,912,800	-	-	816,392,600	1,982,465,220	493,128,500	0.00%	0.00%	98.11%	96.43%	99.44%	676,784,160	658,397,264
Program penelitian dan pengembangan daerahBidangSosial, Ekonomi dan pemerintahan	-	-	1,300,902,500	999,500,000	629,076,641	-	-	1,142,938,864	934,243,863	626,480,294	0.00%	0.00%	87.86%	93.47%	99.59%	585,895,828	540,732,604

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi social budaya, ekonomi, tehnologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappedalitbang kabupaten Balangan.

a) Tantangan

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya SDM perencana sektoral di lingkungan Kabupaten Balangan agar memiliki kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang optimal.
2. perlunya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan.
3. Perlunya pengembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Benua Sanggam terlebih dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah.

b) Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Balangan, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan

1. Adanya kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan.
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal sehingga Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis sertapendidikan dan pelatihan mutlak selalu dilakukan secara terus menerus. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas dan telah diterapkannya Permendagri 54 Tahun 2010 yang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan.
3. Adanya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

No	Identifikasi permasalahan	Tupoksi	Tantangan	Peluang
1.	Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, pemerintahan dan pembangunan manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya SDM perencana sektoral di lingkungan Kabupaten Balangan agar memiliki kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang optimal. 2. perlunya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. 3. Perlunya pengembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. 2. Adanya peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal sehingga Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

			<p>dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Benua Sanggam terlebih dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah.</p>	<p>bimbingan teknis sertapendidikan dan pelatihan mutlak selalu dilakukan secara terus menerus. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas dan telah diterapkannya Permendagri 54 Tahun 2010 yang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan.</p> <p>3. Adanya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat</p>
--	--	--	--	---

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

				terhadap perencanaan pembangunan.
2.	Kebijakan pembangunan belum didasarkan pada kajian ilmiah	Mengkoordinasi, membina dan mengawasi bidang penelitian dan inovasi daerah	<p>1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peneliti dan perekayasa.</p> <p>2. perlunya dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.</p> <p>3. perlunya sinkronisasi, koordinasi pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan</p>	<p>1. Adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang peneliti dan perekayasa serta dukungan dalam peningkatan kapasitas SDM.</p> <p>2. adanya system pentahapan dalam proses pelaksanaan, penelitian dan pengembangan.</p> <p>3. adanya forum sinkronisasi dan koordinasi kelitbangan</p>

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

3.	Kebijakan pembangunan belum berorientasi pada inovasi		1. Perlunya menumbuhkan budaya inovasi pada perangkat daerah 2. perlunya optimalisasi pembinaan, penginventarisasian dan pengintegrasian data inovasi daerah di dalam sebuah aplikasi inovasi daerah	1. Adanya diseminasi jenis prosedur, metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. 2. adanya system informasi daerah (SINOVDA)
----	---	--	---	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik.

Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalumasih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam target RPJMD tahun terakhir pada kurun waktu 2016-2021, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan disajikan ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan, yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan sosial budaya, diantaranya adalah :

- 1) Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Balangan dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Masih Rendah.
- 2) Rendahnya dan kurang berkembangnya sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal).

-
- 3) Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten Balangan dan ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang rendah.
 - 4) Tata kelola pemerintahan belum optimal diantaranya manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penataan system manajemen SDM – ASN, penguatan akutabilitas dan pengawasan yang semuanya belum optimal dilakukan kabupaten balangan.
 - 5) Rendahnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif. Serta masih rendahnya Nilai Indeks Desa Membangun

Dalam penyelenggaraan pembangunan, proses perencanaan pembangunan terdiri atas empat (4) tahapan yakni : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sumber daya Bappedalitbang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan jika dilihat beberapa tahun kebelakang dapat diidentifikasi permasalahan yang termuat dalam Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih rendah	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Kurangnya kualitas SDM perencana
		Kurangnya keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2.	Kebijakan pembangunan belum didasarkan pada kajian ilmiah	Hasil rekomendasi kelitbang belum implementatif oleh pemangku kebijakan	kurangnya SDM peneliti dan perekayasa Kurangnya dana untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan Belum optimalnya pelaksanaan atau penerapan penelitian
3.	Kebijakan pembangunan belum berorientasi pada inovasi	belum terbinanya dan terinventarisirnya data inovasi daerah	Kapasitas SDM di bidang inovasi masih kurang Pengadministrasian data inovasi masih kurang Sarana pendukung inovasi daerah masih belum optimal

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2021-2026

3.2.1 Visi

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam konsep rancangan awal RPJMD yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, visi pembangunan Kabupaten Balangan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut :

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Ketiga pokok visi tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi akhir tercapainya Balangan yang Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "Kabupaten yang Lebih Maju dan Sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki

masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada dibawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

3.2.2 Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan kerukunan umat beragama, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan

ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

MISI I :Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan strategis, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar.
 - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis

MISI II : Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka, dengan sasaran :
 - a) Menurunnya angka pengangguran terbuka

MISI III : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya Indeks Pendidikan
 - b) Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

MISI IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

MISI V :Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif , mempunyai tujuan :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif, dengan sasaran :
 - Menurunkan Angka Kemiskinan
 - Meningkatnya kerukunan umat beragama
 - Menurunkan resiko bencana
 - Meningkatkan Ketentaraman dan Ketertiban Umum
 - Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia
 - Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan
- Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah kabupaten Balangan tersebut, maka Bappedalitbang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah kabupaten Balangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappedalitbang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan kabupaten Balangan antara lain :

- a) Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana serta kandidat doktor;
- c) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d) Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Terhadap kelima Misi Daerah tersebut di atas, Bappedalitbang kabupaten Balangan sebagai perangkat daerah penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berperan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang semakin

transparan, responsif dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik melalui :

- Peningkatan sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan antar sektoral – kewilayahan;
- Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan menengah dan tahunan RPJMD – Renstra – RKPD – Renja;
- Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
- Penyediaan data sebagai bahan perencanaan dan mudah diakses publik.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappedalitbang kabupaten Balangan dengan dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappedalitbang kabupaten Balangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappedalitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Bappedalitbang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah akan mengawal secara langsung sesuai bidang/sektor serta kewilayahan yang berada pada porsi yang sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi BAPPEDALITBANG.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kabupaten Balangan tahun 2013 sd 2032 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman, dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, disusunlah kebijakan penataan ruang yang terdiri atas :

1. Pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
4. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Terkait kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Balangan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan (yang dirangkum dalam suatu Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026) sudah baik karena masing-masing item sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender).

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Balangan, baik infrastruktur publik maupun infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan untuk isu strategis Lingkungan Hidup adalah masih Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan..
- 2) Transformasi struktural dalam perekonomian dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam .
- 3) Peningkatan kualitas Investasi. Kualitas investasi yang baik adalah investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
- 4) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu aspek manajemen perubahan yang belum optimal yang mana belum sepenuhnya penetapan agen perubahan didasarkan pada kebutuhan organisasi sehingga agen perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kabupaten Balangan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappedalitbang kabupaten Balanganyaitu :

Table 5

Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Balangan

No.	Isu Strategis	Aspek
1.	Sumber Daya Manusia	1) Optimalisasi kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2.	Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi	2) Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan, penelitian pengembangan dan inovasi daerah.
		3) Optimalisasi sinkronisasi antar sektor

		dalam mengintervensi permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan penduduk dan tingkat ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.
3.	Sistem Perencanaan dan pengolahan data/informasi perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	4) Terwujudnya secara optimal Sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi
		5) Optimalisasi integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappedalitbang dengan perangkat daerah termasuk e-planing untuk menyerap usulan masyarakat berdasarkan usulan renja Perangkat daerah; dan
		6) Optimalisasi ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
		7) Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kajian sebagai dasar dalam implementasi kebijakan sosial, budaya pemerintahan, infrastruktur ekonomi, dan teknologi.
		8) Optimalisasi pembinaan inventarisasi dan pengintegrasian data inovasi daerah di dalam system informasi inovasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDALITBANG

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappedalitbang untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappedalitbang kabupaten Balangan tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunannya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja pada akhir Periode Renstra	Satker Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan kualitas Reformasi Berokrasi.	Meningkatkan kualitas perencanaan Daerah.	2.INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(integrasi, sinkronisasi, sinergitas)	95	95	95,5	96	96,5	97	98	98	Bidang P2EPD, PPM, ek opras
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	50	50	55	60	65	70	75	75	Bidang Penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappedalitbang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappedalitbang menunjukkan bagaimana cara Bappedalitbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappedalitbang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappedalitbang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappedalitbang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappedalitbang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappedalitbang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappedalitbang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, *sebagai terlampir*.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

VISI	Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan Yang lebih Maju dan Sejahtera		
MISI 4	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	1.Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan diklat,workshop,bimtek,sosialisasi SDM perencana. 2.Melaksanakan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran 3.Meningkatkan ketersediaan data dan informasi 4.Optimalisasi optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan lebih implementatif	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM peneliti dan perekayasa 2.Ketersediaan dana yang cukup untuk penelitian dan pengembangan 3.Mengoptimalkan pelaksanaan atau penerapan penelitian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 – 2026 antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/kota

2. Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di kab/kota
- Monitoring ,Evaluasi dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

-
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

-
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam
3. Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan
 - Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
 - Penelitian dan pengembangan perhubungan

-
- Penelitian dan pengembangan kesehatan
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

RUMUSAN RENSTRA BAPPEDALITBANG

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		63	Rp 5,013,948,700.00	65	Rp 7,710,407,960.00	67	8,000,000,000.00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	10 dok	10 dok	Rp 150,725,000.00	100%	Rp 150,535,000.00	10 dok	16 dok
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan serta Renstra Bappeda (dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 76,400,000.00	3 Dokumen	Rp 40,979,900.00	3 Dokumen	3 Dokumen
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 24,600,000.00	4 Dokumen	Rp 56,800,000.00	4 Dokumen	4 Dokumen
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Tersusunnya LKIP, LPPD, Laporan e-Monev Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 49,725,000.00	3 Dokumen	Rp 52,755,100.00	3 Dokumen	3 Dokumen

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	12 bln	12 bln	Rp 3,173,610,000.00	12 bln	Rp 5,539,691,860.00	12 bln	6,0
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12 bln	12 bln	Rp 3,114,690,000.00	12 bln	Rp 5,462,142,000.00	12 bln	6,
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	Rp 44,520,000.00	12 bln	Rp 60,744,960.00	12 bln	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 7,200,000.00	2 Dokumen	Rp 8,400,200.00	2 Dokumen	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 7,200,000.00	2 Dokumen	Rp 8,404,700.00	2 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	12 bln	12 bln	Rp 129,550,000.00	12 bln	Rp 140,200,000.00		15
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	55 stell	55 stell	Rp 13,750,000.00	55 stell	Rp 18,000,000.00		
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	12 bln	12 bln	Rp 115,800,000.00	12 bln	Rp 122,200,000.00	12 bln	1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	1 tahun	1 tahun	Rp 478,539,200.00	1 tahun	Rp 584,129,800.00	1 tahun	6,

01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 bln	12 bln	Rp 18,123,500.00	12 bln	Rp 23,667,700.00	12 bln	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	4 unit	Rp 138,000,000.00	4unit	Rp 210,150,000.00	4unit	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	Rp 65,355,700.00	12 bln	Rp 55,872,100.00	12 bln	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	12 bln	12 bln	Rp 9,600,000.00	12 bln	Rp 8,640,000.00	12 bln	
09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan tamu	12 bln	12 bln	Rp 247,460,000.00	12 bln	Rp 285,800,000.00	12 bln	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah			Rp 307,650,000.00		Rp 417,008,000.00		21
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan parkir bappeda		1 paket	Rp 100,000,000.00	1 keg	Rp -		
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappeda		1 paket	Rp 207,650,000.00	1 dok	Rp 417,008,000.00		2

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	12 bln	12 bln	Rp 418,714,500.00	1 tahun	Rp 574,113,300.00		6
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	12 bln	12 bln	Rp 159,500,000.00	12 bln	Rp 196,000,000.00	12 bln	2
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik, persentase ruangan /tempat kerja yg bersih, tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bln	12 bln	Rp 259,214,500.00	12 bln	Rp 378,113,300.00	12 bln	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappeda	12 bln	12 bln	Rp 355,160,000.00	1 tahun	Rp 304,730,000.00		33
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	100%	100%	Rp 231,320,000.00	100%	Rp 146,290,000.00		1
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	22 unit	22 unit	Rp 123,840,000.00	22 unit	Rp 158,440,000.00		1
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu	92%	93%	Rp 3,988,938,200.00	94%	Rp 2,490,260,900.00	95%	2,7

	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase data/informasi yang baik	92%	93%	Rp 3,988,938,200.00	94%	Rp 465,623,900.00	95%	5
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah yg baik & tepat waktu	7 dok	7 dok	Rp 3,257,591,200.00	7 dok	Rp 2,393,644,900.00		2,6
02	Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya	Terlaksanannya pengintegrasian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 29,866,000.00	1 Kegiatan	Rp 149,126,000.00	1 Kegiatan	1
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (RKPD dan RPJMD)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 61,600,000.00	2 Kegiatan	Rp 32,300,000.00	2 Kegiatan	
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Tingkat Kabupaten (RKPD dan RPJMD)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 611,830,000.00	2 Kegiatan	Rp 206,288,900.00	2 Kegiatan	
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ota	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten /kota	2dokumen	1 dokumen 3bahan1dokumen 2dokumen	Rp 2,554,295,200.00	2dokumen	Rp 2,005,930,000.00	2dokumen	2,2

	Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah yg baik	2 Kegiatan 2 Dokumen	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 571,078,000.00	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 465,623,900.00		5
	Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah Yang dikelola; Data OVOD	1 Kegiatan 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Dokumen	Rp 54,146,000.00	1 Kegiatan 1 Dokumen	Rp 214,776,000.00		2
	Penyusunan Profil Pembagunan Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Profil kabupaten Balangan.	2 Kegiatan 2 Dokumen	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 516,932,000.00	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 250,847,900.00		2
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan SKPD yg baik dan tepat waktu	2 Kegiatan 2 Dokumen	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 160,269,000.00	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 96,616,000.00		10
	Monitoring ,Evaluasi dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	2 Kegiatan 2 Dokumen	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 160,269,000.00	2 Kegiatan 2 Dokumen	Rp 96,616,000.00		1
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik dan tepat waktu (bidang infrastruktur & kewalyahan)		100%	Rp 649,637,500.00	100%	Rp 921,188,000.00		1,0
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik dan tepat waktu (bidang pemerintahan dan pembanguna manuasia)		100%	Rp 390,000,000.00	100%	Rp 869,230,000.00		9

	Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik & tepat waktu (gakor pemerintahan & pembangunan manusia)			Rp 390,000,000.00	16 dok	Rp 869,230,000.00		9
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Rancangan RKPD Sub Bidang Pemerintahan (Ranwal RKPD Tahunan dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 bhn	2 bhn	Rp 90,656,000.00	2 bhn	Rp 308,776,000.00	2 bhn	3
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi sub bidang Pemerintahan (Dokumen Renja SKPD Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2020 Garis Koordinasi Sub)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 50,274,000.00	2 Dokumen	Rp 128,810,000.00	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Dokumen monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan (Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan dan Monev Tahunan-2 SKPD Garis Koordinasi)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 42,860,000.00	4 Dokumen	Rp 115,705,000.00	4 Dokumen	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	5 keg	5 keg	Rp 21,210,000.00	5 keg	Rp 78,400,000.00	5 keg	

	Pemerintahan								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Rancangan RKPD Sub Bidang Pembangunan manusia(Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 bhn	2 bhn	Rp 44,490,000.00	2 bhn	Rp 44,590,000.00	2 bhn	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi sub bidangPembangunan manusia(Dokumen Renja SKPD Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2020 Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 44,290,000.00	2 Dokumen	Rp 47,260,000.00	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen monitoring dan evaluasi bidang Pembangunan manusia (Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan dan Monev Tahun n-2 SKPD Garis Koordinasi)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 55,305,000.00	4 Dokumen	Rp 37,368,000.00	4 Dokumen	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	5 keg	5 keg	Rp 40,915,000.00	5 keg	Rp 108,321,000.00	5 keg	

	Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik & tepat waktu(gakor ekonomi & SDA)	100%	100%	Rp 299,636,000.00	100%	Rp 567,201,000.00	100%	6
	Koordinasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	Rancangan RKPDP Sub Bidang Dunia Usaha (Ranwal RKPDP Tahun n dan Perubahan RKPDP Tahun Berjalan Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 bhn	2 bhn	Rp 31,923,000.00	2 bhn	Rp 103,960,000.00	2 bhn	
	Asistensi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi sub bidang Dunia Usaha (Dokumen Renja SKPD Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2022)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 28,450,000.00	2 Dokumen	Rp 30,000,000.00	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	Dokumen monitoring dan evaluasi bidang Dunia Usaha (Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan dan Monev Tahun n-2 SKPD Garis Koordinasi)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 22,340,000.00	4 Dokumen	Rp 13,000,000.00	4 Dokumen	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	5 keg	5 keg	Rp 31,923,000.00	5 keg	Rp 59,000,000.00	5 keg	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Rancangan RKPD Sub Bidang pertanian dan ketahanan pangan(Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 65,843,000.00	2 Dokumen	Rp 125,166,000.00	2 Dokumen	1
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi sub bidang pertanian dan ketahanan pangan (Dokumen Renja SKPD Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2022)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 51,193,000.00	2 Dokumen	Rp 155,799,000.00	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen monitoring dan evaluasi bidang pertanian dan ketahanan pangan (Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan dan Monev Tahun n-2 SKPD Garis Koordinasi)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 32,380,000.00	4 Dokumen	Rp 39,243,000.00	4 Dokumen	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	5 keg	5 keg	Rp 35,584,000.00	5 keg	Rp 41,033,000.00	5 keg	
	Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik & tepat waktu(gakor infrastruktur	3 dokumen	3 dokumen	Rp 350,001,500.00	3 dokumen	Rp 353,987,000.00		3

		dn LH)							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub Bidang Fisik dan Prasarana (Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 92,243,000.00	2 Dokumen	Rp 120,901,000.00		
	Asistensi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi sub bidang Fisik dan Prasarana (Dokumen Renja SKPD Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2022a	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 28,450,000.00	2 Dokumen	Rp 22,400,000.00		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Dokumen monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan fisik prasarana (Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan dan Monev Tahun n-2 SKPD Garis Koordinasi)	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 47,384,500.00	5 Dokumen	Rp 151,825,000.00		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	5 keg	5 keg	Rp 31,923,000.00	5 keg	Rp 58,861,000.00		

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub Bidang Fisik dan Prasarana (Ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 67,288,000.00	2 Dokumen	Rp -		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi sub bidang Fisik dan Prasarana (Dokumen Renja SKPD Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2020 Garis Koordinasi Sub Bidang)	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 28,450,000.00	2 Dokumen	Rp -		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Dokumen monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan fisik prasarana (Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan dan Monev Tahun n-2 SKPD Garis Koordinasi)	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 22,340,000.00	5 Dokumen	Rp -		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	5 keg	5 keg	Rp 31,923,000.00	5 keg	Rp -		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan			Rp 729,849,900.00	0	Rp 774,769,900.00		8
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi daerah yg berkelanjutan		40	Rp 134,999,900.00	45	Rp 348,990,000.00	50	38

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD		4dok	Rp 523,490,000.00		Rp 581,926,000.00		6
	Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah		1	Rp 101,780,000.00		Rp -		
	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan		1	Rp 90,080,000.00		Rp -		
	Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	Jumlah penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan		1	Rp 114,900,000.00		Rp -		
	Penelitian dan pengembangan perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan perhubungan		1	Rp 114,950,000.00		Rp -		
	Penelitian dan pengembangan kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan		1dok	Rp 101,780,000.00		Rp -		
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			Rp -		Rp 581,926,000.00		6
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg dimanfaatkan SKPD		2 dok	Rp 206,359,900.00	16 dok%	Rp 134,453,900.00		14

	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.		1dok	Rp 101,780,000.00	2 bhn	Rp 58,390,000.00	1dok	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola		1dok	Rp 104,579,900.00	2 Dokumen	Rp 76,063,900.00	1dok	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan yg dimanfaatkan SKPD			Rp -		Rp 58,390,000.00	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			Rp -	1 dok	Rp 58,390,000.00	1 dok	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg dijaring		1	Rp 134,999,900.00		348,990,000		3
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				Rp -		Rp 98,990,000.00		1
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah diseminasi, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif		1	Rp 134,999,900.00		Rp 250,000,000.00		2

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappedalitbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Balangan, Bappedalitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Table 7

Indikator Kinerja Bappedalitbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran strategis	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	<i>Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi</i>	Nilai sakip	66,04	68,40	70,40	72,40	74,40	76,40%	78,20%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Bappedalitbang selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Bappedalitbang Kabupaten Balangan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Parangin, Agustus 2021

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan,

Rakhmadi Yusni,S.Sos.M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690324 199703 1 001

RUMUSAN RENSTRA BAPPETLITBANGDA TAHUN 2021 - 2028

Kode Rencana	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	6,3	Rp 5.019.948.700,00	6,5	Rp 7.704.407.950,00	6,7	Rp 8.244.935.955,00	6,9	Rp 9.631.640.951,60	7,2	Rp 9.270.051.146,76	7,5	Rp 10.662.674.216,44		Rp 51.049.839.955,80					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	10 dok	Rp 150.275,000,00	100%	Rp 150,335,000,00	10 dok	Rp 165,528,000,00	10 dok	Rp 181,147,950,00	10 dok	Rp 200,362,095,00	10 dok	Rp 220,398,293,50		Rp 1.069,736,228,50					
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja mudi dan Renja Perubahan serta Renja Bappeda (dokumen)	3 Dokumen	Rp 76,000,000,00	3 Dokumen	Rp 40,977,900,00	3 Dokumen	Rp 45,077,890,00	3 Dokumen	Rp 49,585,679,00	3 Dokumen	Rp 54,544,149,50	3 Dokumen	Rp 59,998,672		Rp 316,586,380			Rappedalitbang	Balangan	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	4 Dokumen	Rp 24,600,000,00	4 Dokumen	Rp 36,800,000,00	4 Dokumen	Rp 62,480,000,00	4 Dokumen	Rp 68,728,000,00	4 Dokumen	Rp 75,400,800,00	4 Dokumen	Rp 83,160,880		Rp 371,369,680			Rappedalitbang	Balangan	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Tersusunnya LKJP, LPFD, Laporan e-Monev Bappeda	3 Dokumen	Rp 49,725,000,00	3 Dokumen	Rp 57,750,000,00	3 Dokumen	Rp 58,030,610,00	3 Dokumen	Rp 63,833,671,00	3 Dokumen	Rp 70,217,098,10	3 Dokumen	Rp 77,38,740		Rp 370,800,10			Rappedalitbang	Balangan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah serta laporan keuangan baik	12 bln	Rp 3,773,610,000,00	12 bln	Rp 5,339,691,800,00	12 bln	Rp 6,093,661,040,00	12 bln	Rp 6,703,027,150,80	12 bln	Rp 7,375,339,865,64	12 bln	Rp 8,110,662,852,23		Rp 36,995,982,774,49					
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12 bln	Rp 3,116,690,000,00	12 bln	Rp 5,462,242,000,00	12 bln	Rp 6,008,356,200,00	12 bln	Rp 6,609,191,820,00	12 bln	Rp 7,270,111,000,00	12 bln	Rp 7,997,122,00		Rp 36,461,613,14			Rappedalitbang	Balangan	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Calupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	12 bln	Rp 44,520,000,00	12 bln	Rp 60,744,960,00	12 bln	Rp 66,819,456,00	12 bln	Rp 73,501,401,60	12 bln	Rp 80,851,541,20	12 bln	Rp 88,936,696		Rp 415,374,055			Rappedalitbang	Balangan	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Rp 7,200,000,00	2 Dokumen	Rp 8,400,200,00	2 Dokumen	Rp 9,240,220,00	2 Dokumen	Rp 10,164,242,00	2 Dokumen	Rp 11,180,666,20	2 Dokumen	Rp 12,298,731		Rp 58,484,046			Rappedalitbang	Balangan	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	Rp 7,200,000,00	2 Dokumen	Rp 8,400,200,00	2 Dokumen	Rp 9,245,170,00	2 Dokumen	Rp 10,169,687,00	2 Dokumen	Rp 11,186,655,70	2 Dokumen	Rp 12,305,321		Rp 58,511,534			Rappedalitbang	Balangan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	12 bln	Rp 129,550,000,00	12 bln	Rp 140,200,000,00	12	Rp 154,220,000,00	12	Rp 169,642,000,00	12	Rp 186,606,100,00	12	Rp 199,674,750		Rp 1,112,409,180,00					
02	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakan dinas berserta perlengkapan	55 stell	Rp 15,750,000,00	55 stell	Rp 18,000,000,00	Rp 19,800,000,00	Rp 19,800,000,00	Rp 21,780,000,00	Rp 23,928,000,00	Rp 26,248,200	Rp 28,668,200	Rp 31,072,000		Rp 259,931,300			Rappedalitbang	Balangan		
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ujara peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	12 bln	Rp 115,800,000,00	12 bln	Rp 122,200,000,00	12 bln	Rp 134,420,000,00	12 bln	Rp 147,862,000,00	12 bln	Rp 162,648,000,00	12 bln	Rp 169,542,760		Rp 831,471,080			Rappedalitbang	Balangan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	1 tahun	Rp 478,539,200,00	1 tahun	Rp 584,129,800,00	1 tahun	Rp 642,542,760,00	1 tahun	Rp 706,797,058,00	1 tahun	Rp 777,476,763,80	1 tahun	Rp 855,224,460,18		Rp 4.044,710.041,98					
01	Penyediaan/Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Perenerangan Bangunan kantor	12 bln	Rp 18,123,500,00	12 bln	Rp 23,667,200,00	12 bln	Rp 26,034,470,00	12 bln	Rp 28,697,917,00	12 bln	Rp 31,072,000,00	12 bln	Rp 34,695,880		Rp 162,417,750			Rappedalitbang	Balangan	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	Rp 138,900,000,00	4unit	Rp 210,350,000,00	4unit	Rp 231,165,000,00	4unit	Rp 254,281,500,00	4unit	Rp 279,709,690,00	4unit	Rp 307,880,670		Rp 1.410,984,760			Rappedalitbang	Balangan	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan	12 bln	Rp 65,355,000,00	12 bln	Rp 158,327,000,00	12 bln	Rp 164,459,310,00	12 bln	Rp 174,365,310,00	12 bln	Rp 184,365,310,00	12 bln	Rp 194,365,310,00		Rp 406,460,458			Rappedalitbang	Balangan	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan peraturan	12 bln	Rp 9,600,000,00	12 bln	Rp 8,640,000,00	12 bln	Rp 9,504,000,00	12 bln	Rp 10,454,400,00	12 bln	Rp 11,499,840,00	12 bln	Rp 12,649,824		Rp 64,348,064			Rappedalitbang	Balangan	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makanan dan minuman	12 bln	Rp 247,460,000,00	12 bln	Rp 285,800,000,00	12 bln	Rp 314,380,000,00	12 bln	Rp 345,818,000,00	12 bln	Rp 380,399,800,00	12 bln	Rp 418,439,780		Rp 1.999,297,510			Rappedalitbang	Balangan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah/urusan/pelayanan/tenaga/tenaga	1 paket	Rp 397,650,000,00	Rp 477,000,000,00	Rp 518,390,000,00	Rp 569,647,000,00	Rp 621,047,000,00	Rp 673,304,000,00	Rp 725,561,000,00	Rp 777,818,000,00	Rp 830,075,000,00	Rp 882,332,000,00	Rp 934,589,000,00		Rp 2.049,701,000,00					
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan parkir bappeda	1 paket	Rp 100,000,000,00	1 keg	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,106,647,000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 1.206,647,000			Rappedalitbang	Balangan		
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappeda	1 paket	Rp 207,650,000,00	1 dok	Rp 477,000,000,00	Rp 518,390,000,00	Rp 569,647,000,00	Rp 621,047,000,00	Rp 673,304,000,00	Rp 725,561,000,00	Rp 777,818,000,00	Rp 830,075,000,00	Rp 882,332,000,00		Rp 843,054,000			Rappedalitbang	Balangan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	12 bln	Rp 418,214,900,00	1 tahun	Rp 574,113,300,00	Rp 631,514,630,00	Rp 694,677,093,00	Rp 764,144,800,30	Rp 830,075,000,00	Rp 900,146,100,00	Rp 970,221,200,00	Rp 1,040,296,300,00	Rp 1,110,371,400,00		Rp 3.923,233,047,81					
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	12 bln	Rp 199,500,000,00	12 bln	Rp 196,000,000,00	12 bln	Rp 215,600,000,00	12 bln	Rp 237,160,000,00	12 bln	Rp 260,876,000,00	12 bln	Rp 286,963,600		Rp 1,316,099,600			Rappedalitbang	Balangan	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik/persentase ruangan tempat kerja yg	12 bln	Rp 259,216,500,00	12 bln	Rp 378,113,300,00	12 bln	Rp 416,924,630,00	12 bln	Rp 457,537,093,00	12 bln	Rp 503,268,802,30	12 bln	Rp 553,995,683		Rp 2,567,544,363			Rappedalitbang	Balangan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappeda	12 bln	Rp 355,160,000,00	1 tahun	Rp 304,732,000,00	Rp 335,203,000,00	Rp 368,723,300,00	Rp 405,595,630,00	Rp 445,526,960,00	Rp 485,460,430,00	Rp 525,392,860,00	Rp 565,220,770,00	Rp 605,048,680,00		Rp 2.215,567,230,00					
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas operasional dan lapangan	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	100%	Rp 231,320,000,00	100%	Rp 146,290,000,00	Rp 160,919,000,00	Rp 177,010,000,00	Rp 194,713,900,00	Rp 214,583,189	Rp 231,474,089	Rp 249,364,189	Rp 267,255,289		Rp 1.124,443,079			Rappedalitbang	Balangan		
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	22 unit	Rp 123,840,000,00	22 unit	Rp 158,440,000,00	Rp 174,284,000,00	Rp 191,714,400,00	Rp 210,883,440,00	Rp 231,977,004	Rp 253,070,448	Rp 274,163,892	Rp 295,258,336		Rp 1.099,132,044			Rappedalitbang	Balangan		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keterlaksanaan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten)	98,4%	Rp 3,088,938,200,00	98,6%	Rp 2,955,848,800,00	98,8%	Rp 3,251,473,280,00	99%	Rp 3,576,620,608,00	99,2%	Rp 4,074,442,075,00	99,4%	Rp 4,482,106,282,69		Rp 23,339,666,246,59			Rappedalitbang	Balangan	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKP) dgn nilai baik	84%	Rp 3.437.091.200,00	86%	Rp 3.293.646,900,00	88%	Rp 2.653.006.390,00	90%	Rp 2.806.310.330,00	92%	Rp 3.185.941.360,00	94%	Rp 3.504.515.498,00		Rp 17.871.932,678,00					
02	Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya	4 kegiatan	Rp 29,866,000,00	4 kegiatan	Rp 149,216,000,00	4 kegiatan	Rp 164,038,600,00	4 kegiatan	Rp 180,441,460,00	4 kegiatan	Rp 198,486,706,00	4 kegiatan	Rp 218,335,377		Rp 940,295,143			Rappedalitbang	Balangan	
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen konsultasi publik	1 dokumen	Rp 61,600,000,00	1 dokumen	Rp 32,300,000,00	1 dokumen	Rp 35,530,000,00	1 dokumen	Rp 39,080,000,00	1 dokumen	Rp 42,991,000,00	1 dokumen	Rp 47,290,410		Rp 238,794,270			Rappedalitbang	Balangan	
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Nota	Jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang	1 dokumen	Rp 611,830,000,00	1 dokumen	Rp 206,288,900,00	1 dokumen	Rp 226,917,790,00	1 dokumen	Rp 249,609,569,00	1 dokumen	Rp 274,970,515,00	1 dokumen	Rp 302,027,528		Rp 1,871,144,363			Rappedalitbang	Balangan	
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	Rp 2.554.395.200,00	3 dokumen	Rp 2.005.930,000,00	3 dokumen	Rp 2.206.521,000,00	3 dokumen	Rp 2.427.775,300,00	3 dokumen	Rp 2.669.893,300,00	3 dokumen	Rp 2.936.882,111		Rp 14.800,698,444			Rappedalitbang	Balangan	
	Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah	70%	Rp 574,070,000,00	70%	Rp 465,623,900,00	70%	Rp 512,186,390,00	70%	Rp 563,404,079,00	70%	Rp 614,104,818,00	70%	Rp 664,815,299,00		Rp 3.708,513,226,00					
	Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang diketela	Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah Yang diketela	2 data	Rp 54,146,000,00	2 data	Rp 214,776,000,00	2 data	Rp 236,253,600,00	2 data	Rp 259,878,060,00	2 data	Rp 272,068,326,00	2 data	Rp 284,258,588		Rp 916,328,048			Rappedalitbang	Balangan	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi											
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp									
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Profil daerah kabupaten/balangan.	2 buah	2 buah	Rp	516,931,000.00	2 buah	Rp	250,847,900.00	2 buah	Rp	275,932,690.00	2 buah	Rp	303,525,959.00	2 buah	Rp	688,036,492.00	2 buah	Rp	736,840,141	2 buah	Rp	2,291,115,183	Bappedalitbang	Balangan		
01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan	100%	100%	Rp	160,269,000.00	100%	Rp	99,646,000.00	100%	Rp	106,277,600.00	100%	Rp	116,926,000.00	100%	Rp	128,599,896.00	100%	Rp	141,493,493.00	100%	Rp	170,170,361.00	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah	0	0	Rp	-	0	Rp	-	4 keg	Rp	76,277,600.00	4 keg	Rp	83,905,360.00	4 keg	Rp	92,295,896.00	4 laporn	Rp	101,525,486	16 keg	Rp	354,004,340	Bappedalitbang	Balangan		
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	8 dok	8 dok	Rp	160,269,000.00	1000k	Rp	99,646,000.00	10 dok	Rp	30,000,000.00	10 dok	Rp	33,000,000.00	10 dok	Rp	36,300,000.00	10 dok	Rp	39,930,000	58 dok	Rp	396,115,000	Bappedalitbang	Balangan		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik	91,81		Rp	649,637,500.00		Rp	921,488,000.00		Rp	1,013,306,800.00		Rp	1,114,617,480.00		Rp	1,238,101,238.00		Rp	1,348,713,300.80		Rp	6,113,581,358.80	Bappedalitbang	Balangan		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik	91,81	91,81	Rp	390,000,000.00	93,61	Rp	869,230,000.00	93,61	Rp	950,953,000.00	96,21	Rp	1,005,1768,300.00	951	Rp	1,056,945,190.00	96,81	Rp	1,272,659,649.00	96,81	Rp	5,696,276,673.00	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gkorpemerintahan & pembangunan manusia)	69	69	Rp	390,000,000.00	65	Rp	869,230,000.00	65	Rp	956,193,000.00	66	Rp	1,005,1768,300.00	66	Rp	1,056,945,190.00	66	Rp	1,272,659,649.00	299	Rp	5,696,276,673.00	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah bahan rangkai RKPD Sub Bidang Pemerintahan (ramwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis Koordinasi sub Bidang)	3 bhn	3 bhn	Rp	90,656,000.00	2 bhn	Rp	308,276,000.00	2 bhn	Rp	339,653,600.00	2 bhn	Rp	373,618,660.00	2 bhn	Rp	410,980,856.00	2 bhn	Rp	452,078,980	13 bhn	Rp	1,975,714,358	Bappedalitbang	Balangan		
		Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ramwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan)	0	0	Rp	-	2	Rp	-	2	Rp	-	2	Rp	-	2	Rp	-	2	Rp	-	0	0	0	0			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen renja yang diverifikasi	32 dok	32	Rp	50,276,000.00	32	Rp	128,810,000.00	32	Rp	141,691,000.00	32	Rp	155,860,100.00	32	Rp	171,446,110.00	32	Rp	188,590,221	192	Rp	836,621,931	Bappedalitbang	Balangan		
		Jumlah dokumen Renja yang diverifikasi Bidang sub bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	0	0	Rp	-	6	Rp	-	6	Rp	-	6	Rp	-	6	Rp	-	6	Rp	-	6	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	64 dok	64	Rp	42,860,000.00	64	Rp	115,705,000.00	64	Rp	127,275,500.00	64	Rp	140,003,050.00	64	Rp	154,003,355.00	64	Rp	169,403,691	384	Rp	749,250,599	Bappedalitbang	Balangan		
		Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi bidang sub bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	0	0	Rp	-	12	Rp	-	12	Rp	-	12	Rp	-	12	Rp	-	12	Rp	-	12	0	0	0	0		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase jenis fasilitasi forum/pokja/pancung/kepentingan	100	100	Rp	21,210,000.00	100	Rp	78,400,000.00	100	Rp	86,240,000.00	100	Rp	94,864,000.00	100	Rp	104,350,400.00	100	Rp	114,785,440	100	Rp	499,849,840	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ramwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan)	3 bhn	3	Rp	44,490,000.00	2	Rp	44,590,000.00	2	Rp	49,049,000.00	2	Rp	53,953,900.00	2	Rp	59,949,490.00	2	Rp	65,284,219	13	Rp	316,716,409	Bappedalitbang	Balangan		
		Jumlah Rancangan RKPD Sub Bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa (Ramwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan)	3 bhn	3	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	3	0	0	0			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja yang diverifikasi sub bidang pembangunan manusia	8 Dokumen	8	Rp	44,290,000.00	8	Rp	47,280,000.00	8	Rp	51,986,000.00	8	Rp	57,184,600.00	8	Rp	62,903,600.00	8	Rp	69,193,366	48	Rp	332,871,026	Bappedalitbang	Balangan		
		Jumlah dokumen renja yang diverifikasi bidang sub bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	6 dokumen	6 dokumen	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	6	0	0	0			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	16 dokumen	16	Rp	55,305,000.00	16	Rp	37,368,000.00	16	Rp	41,104,800.00	16	Rp	45,215,280.00	16	Rp	49,736,808.00	16	Rp	54,710,489	96	Rp	283,441,377	Bappedalitbang	Balangan		
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang sub bidang Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	12 dokumen	12 dokumen	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	0	0	0			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase jenis fasilitasi forum/pokja/pancung/kepentingan	100	100	Rp	40,975,000.00	100	Rp	108,321,000.00	100	Rp	119,153,000.00	100	Rp	131,068,410.00	100	Rp	144,175,251.00	100	Rp	158,599,726	100	Rp	202,235,537	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gkorperekonomi & SDA)	12 dokumen	12 dokumen	Rp	299,436,000.00	8 dokumen	Rp	567,201,000.00	8 dokumen	Rp	623,921,100.00	8 dokumen	Rp	686,133,210.00	8 dokumen	Rp	754,944,531.00	8 dokumen	Rp	830,438,984.10	52 dokumen	Rp	3,762,454,825.10	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	3 bhn	3 bhn	Rp	31,923,000.00	2 bhn	Rp	103,960,000.00	2 bhn	Rp	114,956,000.00	2 bhn	Rp	125,791,600.00	2 bhn	Rp	138,370,760.00	2 bhn	Rp	152,207,836	13 bahan	Rp	646,609,194	Bappedalitbang	Balangan		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp	28,495,000.00	4 Dokumen	Rp	30,000,000.00	4 Dokumen	Rp	33,000,000.00	4 Dokumen	Rp	36,300,000.00	4 Dokumen	Rp	39,930,000.00	4 Dokumen	Rp	43,923,000	26 Dokumen	Rp	211,663,000	Bappedalitbang	Balangan		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan moner tahun n-2 SKPD subbid ekonomi	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp	22,340,000.00	4 Dokumen	Rp	13,000,000.00	4 Dokumen	Rp	14,300,000.00	4 Dokumen	Rp	15,790,000.00	4 Dokumen	Rp	17,305,000.00	4 Dokumen	Rp	19,033,300	24 Dokumen	Rp	101,706,300	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pancung/kepentingan	5 keg	5 keg	Rp	31,923,000.00	5 keg	Rp	59,000,000.00	5 keg	Rp	64,900,000.00	5 keg	Rp	71,390,000.00	5 keg	Rp	78,519,000.00	5 keg	Rp	86,981,900	30 keg	Rp	392,113,900	Bappedalitbang	Balangan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	3 bhn	3 bhn	Rp	65,843,000.00	2 bhn	Rp	125,146,000.00	2 bhn	Rp	137,682,600.00	2 bhn	Rp	151,490,860.00	2 bhn	Rp	166,599,946.00	2 bhn	Rp	183,255,94	13 bahan	Rp	829,993,947	Bappedalitbang	Balangan		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp	51,193,000.00	4 Dokumen	Rp	155,799,000.00	4 Dokumen	Rp	171,378,900.00	4 Dokumen	Rp	188,516,790.00	4 Dokumen	Rp	207,368,469.00	4 Dokumen	Rp	228,105,316	26 Dokumen	Rp	1,002,361,405	Bappedalitbang	Balangan		

Review Pencapaian

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		
					2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	IKU SKPD						
1	Prosentase pencapaian target RPJMD	-	-	-	70%	75%	80%
2	Prosentase tingkat ketersediaan data & informasi pembangunan daerah	-	-	-	30%	35%	45%
3	Prosentase tingkat konsistensi antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah.	-	-	-	100%	100%	100%
4	Prosentase capaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi & fisik prasarana	-	-	-	70%	75%	80%
5	Prosentase capaian program prioritas target RPJMD bidang sosial & budaya	-	-	-	70%	75%	80%

Tabel T-C.23

Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Pengembangan Daerah

Kabupaten Balangan

Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio	
2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
85%	90%	50%	74%	82%	93%	106%	70.87%	98.36%
55%	60%	34.64%	46.50%	44%	40.50%	53.92%	115.47%	132.86%
100%	100%	0	97%	98.77%	100%	100%	0.00%	97.00%
85%	90%	0	75%	84.60%	93.45%	93.15%	0.00%	100.00%
85%	90%	0%	73%	83%	105.10%	99.56%	0.00%	97.33%

) Capaian pada Tahun ke-		
2018	2019	2020
(18)	(19)	(20)
102.50%	109.52%	117.87%
97.78%	73.64%	89.87%
98.77%	100.00%	100.00%
105.75%	109.94%	103.50%
103.26%	123.65%	110.62%

Anggaran dan Realisasi Badan Perenc

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi	
	1	2	3	4	5	1	2
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pelayanan administrasi perkantoran	1,624,852,350	1,657,878,500	1,617,373,500	1,904,508,000	1,187,692,600	1,361,730,989	1,471,251,886
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,332,938,000	443,450,000	632,000,000	720,515,000	818,845,000	1,227,985,850	178,253,550
Program peningkatan disiplin aparatur	41,400,000	24,450,000	25,100,000	27,500,000	65,700,000	41,400,000	19,000,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	243,000,000	158,000,000	144,000,000	220,000,000	285,000,000	156,867,000	152,591,626
Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	122,350,000	104,400,000	90,475,000	90,625,000	86,635,000	122,010,000	102,000,000
Urusan Perencanaan							
Program Pengembangan data/informasi	267,030,000	275,300,000	343,740,000	767,047,200	762,235,200	251,301,910	272,035,000
Program Kerjasama Pembangunan	398,750,000	362,450,000	-	-	-	358,423,600	334,212,241
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	73,945,000	-	-	-	-	68,995,800	-
Program Perencanaan Tata Ruang	386,850,000	-	-	-	-	367,688,000	-

Program Pemanfaatan Ruang	185,100,000	-	-	-	-	178,753,000	-
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	171,930,000	-	-	-	-	163,713,200	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	158,680,000	154,950,000	59,235,000	-	-	152,855,000	50,710,700
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	182,450,000	160,755,000	252,180,000	-	-	175,980,000	136,369,000
Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar	881,045,000	-	-	-	-	764,455,687	-
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	193,101,000	258,369,000	412,373,750	165,580,000	740,300,000	127,872,200	256,238,000
Program perencanaan pembangunan daerah	1,562,803,500	1,257,760,000	2,048,432,250	1,718,120,000	1,739,779,900	1,423,890,498	1,192,537,647
Program perencanaan pembangunan ekonomi	709,000,000	329,952,500	-	-	-	528,664,960	309,013,500
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	598,880,000	741,410,000	1,140,932,500	603,075,000	503,899,900	536,270,250	664,675,122
Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	1,304,353,000	1,458,270,000	1,273,348,000	-	-

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	965,895,150	425,825,000	1,008,547,500	905,941,000	1,023,178,605	932,366,407	377,928,500
Program konservasi sumber daya kebun raya	-	-	832,099,000	2,055,909,000	495,912,800	-	-
Program penelitian dan pengembangan daerah Bidang Sosial, Ekonomi dan pemerintahan	-	-	1,300,902,500	999,500,000	629,076,641	-	-

Tabel T-C.24
 anaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Balangan

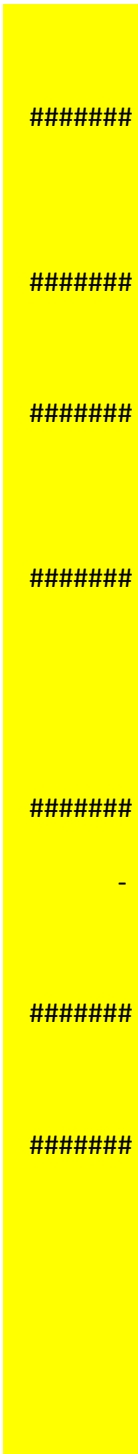
Realisasi pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pe
3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran
2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1,393,504,208	1,811,801,325	1,092,788,525	83.81%	88.74%	86.16%	95.13%	92.01%	1,598,460,990
503,475,491	596,854,750	724,781,950	92.13%	40.20%	79.66%	82.84%	88.51%	789,549,600
25,100,000	24,000,000	63,963,637	100.00%	77.71%	100.00%	87.27%	97.36%	36,830,000
136,800,000	216,010,041	255,343,570	64.55%	96.58%	95.00%	98.19%	89.59%	210,000,000
69,163,750	73,550,000	81,165,000	99.72%	97.70%	76.45%	81.16%	93.69%	98,897,000
								-
299,595,000	694,815,950	754,050,000	94.11%	98.81%	87.16%	90.58%	98.93%	483,070,480
-	-	-	89.89%	92.21%	0.00%	0.00%	0.00%	152,240,000
-	-	-	93.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,789,000
-	-	-	95.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77,370,000

-	-	-	96.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37,020,000
-	-	-	95.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34,386,000
51,815,000	-	-	96.33%	32.73%	87.47%	0.00%	0.00%	74,573,000
-	-	-	96.45%	84.83%	0.00%	0.00%	0.00%	119,077,000
-	-	-	86.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	176,209,000
336,671,500	161,434,800	632,120,800	66.22%	99.18%	81.64%	97.50%	85.39%	353,944,750
1,877,962,386	1,673,886,959	1,634,100,600	91.11%	94.81%	91.68%	97.43%	93.93%	1,665,379,130
-	-	-	74.56%	93.65%	0.00%	0.00%	0.00%	207,790,500
814,041,580	504,791,620	421,637,842	89.55%	89.65%	71.35%	83.70%	83.67%	717,639,480
1,005,121,012	1,288,471,071	1,134,929,045	0.00%	0.00%	77.06%	88.36%	89.13%	807,194,200

945,468,195	887,165,322	1,009,113,298	96.53%	88.75%	93.75%	97.93%	98.63%	865,877,451
816,392,600	1,982,465,220	493,128,500	0.00%	0.00%	98.11%	96.43%	99.44%	676,784,160
1,142,938,864	934,243,863	626,480,294	0.00%	0.00%	87.86%	93.47%	99.59%	585,895,828

Perumbuhan
Realisasi
(18)
1,426,215,387
646,270,318
34,692,727
183,522,447
89,577,750
-
454,359,572
138,527,168
13,799,160
73,537,600

#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	-
#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####
-	-	-	-
#####	#####	-	-
586,500	#####	#####	#####

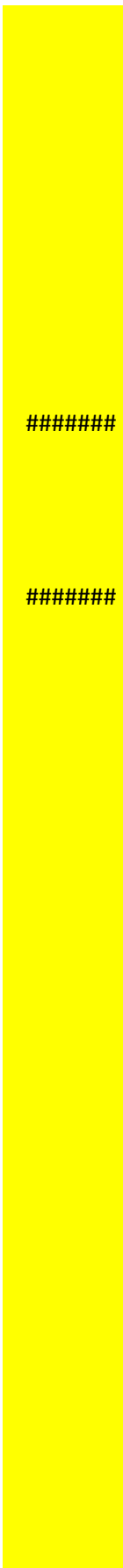


#####	#####	#####
#####	738,200	#####
#####	#####	#####
#####	#####	(546,600)
#####	#####	#####
-	-	-
#####	#####	#####
#####	#####	411,250

35,750,600
32,742,640
51,076,140
62,469,800
152,891,137
302,867,460
1,560,475,618
167,535,692
588,283,283
685,704,226

(285,000)

(521,000)



#####

#####

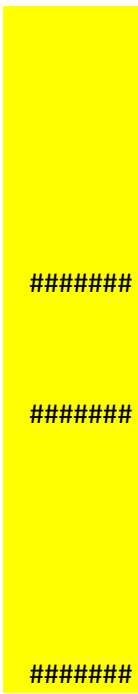
830,408,344
658,397,264
540,732,604

#####

650,000

#####

-



#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

-

-

#####

#####

#####

#####

- - -

- - #####

- -

#####

#####

#####

#####

367,600 #####

#####

#####

-

#####

#####

-

-

20.0

#####

#####

- ##### -

#####

#####

0 ##### -

#####

#####

#####

-

#####

- ##### -

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2021
1	Meningkatkan kualitas perencanaan & inovasi Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	98,1%
		Meningkatnya inovasi daerah	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah	50

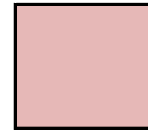
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-

2022	2023	2024	2025	2026
98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	98,6%
55	60	65	70	75

VISI	MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI 4	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai ak		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas perencanaan & inovasi Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan daeha	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah

di masyarakat dan abdi negara

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1	



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Perencanaan pembangunan daerah	98%	95%	95,5%	96,00%	96,50%	97,00%	98,00%
2	Indeks Inovasi daerah	1.616	50(inovatif)	55(inovatif)	60(sgt inovatif)	65(70	75

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian dari sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian Pelaksanaannya.

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(10)
98,00%
75



c. Membandingkan caPaian realisae dengan caPaian tahun s€belumnya
c. Membandingkan caPaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 202
2024

Cascading

TUJUAN

Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

meningkatnya
kepuasan
layanan
masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

1.Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
2.Indeks inovasi daerah

indek
kepuasan
masyarakat

sselon II

KINERJA UTAMA(SASARAN STRATEGIS)					INDIKATOR KINERJA	
1	1.Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah				1	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(integrasi,sinkronisasi,sinergitas)
2	Meningkatnya inovasi daerah				2	INDEKS INOVASI DAERAH

3	meningkatnya kepuasan layanan masyarakat				3 indeks kepuasan masyarakat

SEKRETARIAT

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

seselon III

No	KINERJA UTAMA(SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja			
2		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.			

No	KINERJA UTAMA(sasaran)	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

selon IV

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik			

SUB BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah yg baik

Hasil

tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan daerah

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

selon IV

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku			

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yg baik

Tersedianya dokumen pelaksanaan pengendalian, evaluasi & pelaporan yang baik

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selon IV

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Terpenuhinya administrasi, sarana & prasarana pendukung kinerja Bappedalitbang	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	
2			

SUB BIDANG ANALISA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terpenuhinya Data & Informasi perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah
2		

Tersedianya Data & Informasi perencanaan Pembangunan Daerah

		TARGET AKHIR RENSTRA		INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
		98%		a. Peningkatan Integritas muatan RKPD dengan RPJMD b. Peningkatan Integritas muatan Renja PD dengan Renstra PD c. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran d. peningkatan sinergi muatan RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi, dan RKP	kepala Badan
		75		pelaksanaan penjangkaran inovasi melalui lomba inovasi Balangan (Bailang)	kepala Badan
				peningkatan budaya inovasi melalui sosialisasi, pelatihan dan bimtek	kepala Badan

			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penerapan inovasi	kepala Daerah
		85%	a. peningkatan kualitas pelayanan	
			b. Peningkatan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan	
			c. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan	kepala Badan

BIDANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN EKONOMI & INFRASTRUKTUR

TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
99,4%	Peningkatan Koordinasi dan pembinaan penyusunan, perencanaan dan pendanaan	
	Peningkatan koordinasi dan pembinaan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	
	Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	

KINERJA UTAMA(sasaran)		INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur	Persentase perencanaan daerah dan infrastruktur
2		

SUB BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

TARGET AKHIR	INITIATIVE
8 dokumen	Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Melaksanakan konsultasi publik, forum SKPD dan Musrenbang

KINERJA UTAMA		INDIKATOR
1	Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan yang baik	1. Jumlah perencanaan daerah bidang Kewilayahan

Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur & ke-
baik

SUB BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HID

TARGET AKHIR	INITIATIVE
10 dokumen	melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KI
1	Tersusunnya dokumen perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik	1. Jun perencanaan daerah bi alam dan den

Tersedianya dokumen perencanaan sumberdaya alam dan
yang baik

TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
2 Data	melaksanakan analisa data dan informasi pembangunan daerah	
	melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	

SUB BIDANG EKONOMI

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KI
1	Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi yang baik	1. Jumlah dokur perangkat daerah dengan

Tersedianya dokumen perencanaan ekonomi yang baik

STRUKTUR

**BIDANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**

INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
Persentase dokumen perencanaan perangkat bidang ekonomi dan infrastruktur dengan nilai baik	96,8%	Peningkatan koordinasi perencanaan ekonomi, infrastruktur kewilayahan, SDA dan lingkungan hidup	Kabid ekonomi dan infrastruktur
		Peningkatan pembinaan perencanaan ekonomi, infrastruktur kewilayahan, SDA dan lingkungan hidup	
		Peningkatan pengendalian perencanaan ekonomi, infrastruktur kewilayahan, SDA dan lingkungan hidup	

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR
1 Meningkatkan kualitas perencanaan daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia	96,8%

**SUB BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN APARATUR**

KATEGORI KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Infrastruktur kewilayahan dengan nilai baik	3 Dokumen	Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan daerah bidang infrastruktur kewilayahan		1 Tersusunnya dokumen perencanaan pemerintahan dan aparatur yang baik	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan aparatur dengan nilai baik	13
		Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur kewilayahan				
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur kewilayahan				

wilayahan yang

Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan aparatur yang baik

UP

SUB BIDANG PERENCANAAN
SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR
nyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah sumberdaya manusia dan lingkungan hidup dengan nilai baik	2 dokumen	Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan daerah bidang SDA dan Lingkungan Hidup		1	Tersusunnya dokumen perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang baik	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan nilai baik	13
		Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA dan Lingkungan Hidup					
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA dan Lingkungan Hidup					

lingkungan hidup

Tersedianya dokumen perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desayang baik

**SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA**

KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dengan nilai baik	2 dokumen	Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan daerah bidang Ekonomi	
		Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi	
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi	

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan manusia yang baik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia dengan nilai baik	13

Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia yang baik

**BIDANG PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH**

INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	
Peningkatan koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia		1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan	100%	Melaksanakan kajian berdasarkan isu strategis dan faktual kabupaten Balangan	
Peningkatan pembinaan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia					peningkatan kualitas hasil kelitbangan yang implementative		
Peningkatan Pengendalian perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia		2	Meningkatnya predikat inovasi daerah	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah	,75	melaksanakan pembinaan dan penginventarisasian data inovasi	
					meningkatkan ketersediaan dana untuk penelitian, pengembangan dan inovasi		

SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	
Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan daerah bidang pemerintahan dan aparatur		1	Terlaksananya penjaringan inovasi daerah	Jumlah inovasi yang di jaring	25	Melaksanakan penelitian,pengembangan,per ekayasaan, penerapan, pengoperasian bidang inovasi tekhnologi, bidang pemerintahan sosial kependudukan ekonomi dan pembangunan	
Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan aparatur				jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan,sosial dan kependudukan yg dimanfaatkan SKPD (jumlah penelitian yg di hasilkan / jumlah penelitian yg di	100%	Melaksanakan pelatihan / bimtek/ sosialisasi untuk pembinaan inovasi dan monitoring SKPD	
Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan aparatur				jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD jumlah penelitian yg di hasilkan / jumlah penelitian yg di manfaatkan oleh pemangku	100%	Peningkatan pengadministrasian data inovasi	
						melaksanakan penjaringan inovasi daerah	
						penyediaan sarana dan prasarana	

Tersedianya inovasi daerah

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Pemerintahan,
Sosial dan Kependudukan

INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan daerah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa		1	Terlaksananya penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan yg dimanfaatkan SKPD jumlah penelitian yg di hasilkan / jumlah penelitian yg di manfaatkan oleh pemangku kepentingan x 100)	100	meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM peneliti dan perekayasa bidang penelitian, pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan	
Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa						mengoptimalkan pelaksanaan atau penerapan penelitian bidang penelitian, pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan	
Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa							
			Tersedianya penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan				

**SUB BIDang Penelitian, Pengembangan ekonomi dan
Pembangunan**

INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB	N o	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	INITIATIVE	PENANGGUNG JAWAB
Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan daerah bidang pembangunan manusia		1	Terlaksananya penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD jumlah penelitian yg di hasilkan / jumlah penelitian yg di dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan x 100)	100	meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM peneliti dan perekayasa bidang penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan	
Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pembangunan manusia						mengoptimalkan pelaksanaan atau penerapan penelitian bidang bidang penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan	
Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia							

**Tersedianya penelitian & pengembangan daerah bidang
ekonomi dan pembangunan**

IAN PER TRIWULAN					
7	8	9	10	11	12
15					
			100%		
			100%		
			1 dok		
		24 bhn			
			1 dok		
				1 lap	
				1 lap	

3 Maret 2020
 is Daerah,

KARIADI

1 198803 1 011

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN : 2020

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TAR				
									1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Persentase Bagian pada Setda yang nilai hasil survey pelayanan publiknya baik	100%	106,540,000							
			2	persentase unit pelayanan publik yang baik	100%								
1.1	kegiatan : Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Jumlah Dokumen laporan hasil survei SKM Kabupaten	1 dokumen	106,540,000							
							1.1	Pembentukan tim penyusun laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Terbentuknya tim penyusun laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumah SK Tim	1 SK	1 SK	
							1.2	Pengumpulan bahan dan data hasil survei kepuasan masyarakat	Terkumpulnya bahan dan data hasil survei kepuasan masyarakat	Jumlah Bahan hasil SKM	24 bhn		
			2	Jumlah Dokumen laporan hasil survei SKM Sekretariat Daerah	1 dokumen	106,540,000							
							2.1	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan yang tersusun	1 lap		
							2.2	Penyampaian Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersampainya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan yang disampaikan tepat waktu	1 lap		

Keterangan :
Pengisian kolom Merujuk Pada Renstra, Renja, IKU dan PK SKPD 2020

P.

NIF

RGET CAPAIAN PER TRIWULAN											
5	6	7	8	9	10	11	12				
10											
					100%						
					1 dok						
				24 bhn							
					1 dok						
							1 lap				
							1 lap				

aringin, 18 Maret 2020
 Sekretaris Daerah,

Ir. RUSKARIADI

☎. 19601001 198803 1 011

IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN												PELAKSANAAN			KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
							d	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala	Jumlah pelaksanaan monitoring	4 triwulan																		
							e	Pembahasan dan penyusunan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Terlaksananya Pembahasan dan penyusunan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan	4 kegiatan																		
		Pegembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Dilaksanakannya forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021	Jumlah pelaksanaan forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021	1 keg	32,549,800	a	Pengumpulan bahan dan data forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021	Terkumpulnya bahan dan data forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021	Jumlah bahan dan Data	1 berkas														1 berkas	Tercapai, Terkumpulnya bahan dan data forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021			
							b	Penyusunan laporan pelaksanaan forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021	Tersusunnya laporan pelaksanaan forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021	Jumlah laporan	1 laporan														1 laporan	Tercapai, Tersusunnya laporan pelaksanaan forum konsultasi publik RKPd Tahun 2021			
		Penyusunan RKPd	Tersedianya bahan musrenbang dan rancangan renja SKPD	Jumlah bahan musrenbang dan rancangan renja SKPD	1 dok	472,550,000	a	Penyusunan tim penyusun RKPd	Terbentuknya tim penyusun RKPd	Jumlah SK Tim	1 SK														1 SK	Tercapai, Terbentuknya tim penyusun RKPd dengan SK No.188.45/301/Kum Thn 2020			
							b	Penyusunan dokumen Draf Rancangan Awal RKPd	Tersusunnya dokumen Draf Rancangan Awal RKPd	Jumlah Dokumen	1 dokumen														1 dokumen	Tercapai, Tersusunnya dokumen Draf Rancangan Awal RKPd			
							c	Permintaan Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RKPd	Tersusunnya Data Hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RKPd	Jumlah Dokumen	1 dokumen														1 dokumen	Tercapai, Tersusunnya Data Hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RKPd, Surat Bp-DPRD 11 Januari 2020			
							d	Penyelaksanaan Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPd	Terlaksananya Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPd	Jumlah kegiatan	1 kegiatan														1 kegiatan	Tercapai, Terlaksananya Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPd			
							d	Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPd	Terlaksananya Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPd	Jumlah kegiatan	1 kegiatan														1 kegiatan	Tercapai, Terlaksananya Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPd Verifikasi			

IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN												PELAKSANAAN			KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
							e	Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati	Jumlah laporan	1 laporan																1 laporan	Tercapai, Terlaksananya Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati pada tanggal 26 Februari 2020	
							f	Penyampaian Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD	Tersusunnya Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD	Jumlah surat	1 Surat																1 Surat	Tercapai, Tersusunnya Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD pada tanggal 26 Februari 2020	
							g	Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD	Terlaksananya Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen																1 dokumen	Tercapai, Terlaksananya Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD Verifikasi	
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	1 keg	383,960,000	a	Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan																1 kegiatan	Tercapai, Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Rapat Intern	
							b	Pembentukan Tim Kompilasi Musrenbang RKPD	Terbentuknya Tim Kompilasi Musrenbang RKPD	Jumlah SK Tim	1 SK																1 SK	Tercapai, Terbentuknya Tim Kompilasi Musrenbang RKPD dengan Sk No.188.45/302/Kum Thn 2020	
							c	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan																1 kegiatan	Tercapai, Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan pada tanggal 28 Maret diundur 16 April	
							d	Penyusunan Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 dokumen																1 dokumen	Tercapai, Tersusunnya Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan hasil Musrenbang	
							e	Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD (Pra Musrenbang RKPD) untuk Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD	Terlaksananya Forum SKPD/ Lintas SKPD (Pra Musrenbang RKPD) untuk Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD	Jumlah laporan	1 laporan																1 laporan	Tercapai, Terlaksananya Forum SKPD/ Lintas SKPD (Pra Musrenbang RKPD) untuk Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD Tanggal 22 Maret 2020	

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PENGAMPU RPJMD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas daerah	Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Prosentase pencapaian target RPJMD	95%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja bappeda	62 angka/nilai	5,013,948,700													
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg disusun	3 Dokumen	150,725,000													
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja murni , Renja perubahan dan Renstra Bappeda	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan serta RENSTRA Bappeda	3 Dokumen	76,400,000	1	Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan	Terbentuknya TIM Penyusun Dokumen Perencanaan	Jumlah SK TIM	2SK	1 sk					1 SK		
										2	Pengumpulan bahan dan data Penyusunan dokumen perencanaan	Terkumpulnya bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Bahan dokumen perencanaan	8 bhn				4 bhn		4 bhn		
										3	Penyusunan Dokumen Perencanaan bappeda	Tersusunnya LKj bappeda	Jumlah Dokumen Laporan kinerja	2 Dokumen						2 dok		
						tersusunnya dokumen DPA Bappeda	Jumlah Dokumen DPA Bappeda (dokumen)	2 Dokumen	24,600,000	1	Rapat Intern Penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dianggarkan pada Perubahan dan Tahun 2022	Terlaksananya rapat intern	Jumlah pelaksanaan rapat intern	2 Notulen				1 Notulen		1 Notulen		
										2	Pengumpulan bahan dan data RKA/DPA Bappeda Kab. Balangan	Terkumpulnya bahan dan data RKA/DPA bappeda	Jumlah Bahan Laporan	45 Bahan				45 bhn				
										3	Penyusunan RKA/DPA Bappeda Kab. Balangan	Tersusunnya RKA/DPA Bappeda	Jumlah RKA/DPA bappeda	2 Dokumen					1 dok		1 Dok	
					Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya LKIP, LPPD dan Laporan e-Monev Bappeda	Jumlah dokumen LAKIP . LPPD dan e-Monev yang disusun	3 dokumen	49,725,000	1	Pembentukan tim Penyusun Laporan Kinerja Bappeda	Terbentuknya TIM Penyusun Laporan Kinerja Bappeda	Jumlah SK TIM	1 SK	1 SK							

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN																	
														1	2	3	4	5	6	7	8	9									
											d	Penyelaksanaan Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPD	Terlaksananya Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPD	Jumlah kegiatan	1 kegiatan			1													
											e	Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD	Terlaksananya Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD	Jumlah kegiatan	1 kegiatan			1													
											f	Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati	Jumlah laporan	1 laporan			1													
											g	Penyampaian Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD	Tersusunnya Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD	Jumlah surat	1 surat			1													
											h	Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD	Terlaksananya Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen			1													
							tersediannya bahan musrenbang dan rancangan renstra SKPD serta dilaksanakan bimtek rpjmd	1 dokumen			a	Penyusunan tim penetapan RKPD	Terbentuknya tim penetapan RKPD	Jumlah SK Tim	1 sk	1															
											b	Penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD	Tersusunnya dokumen Rancangan Akhir RKPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen			1													
											c	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama SKPD	Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama SKPD	jumlah laporan	2 laporan			1								1					

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN												
															1	2	3	4	5	6	7	8	9				
											d	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk dilakukan Fasilitasi Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk dilakukan Fasilitasi Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen						1					1	
											e	Pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD berdasarkan Hasil Fasilitasi oleh Bappeda Provinsi	Terlaksananya Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD berdasarkan Hasil Fasilitasi oleh Bappeda Provinsi	Jumlah Dokumen	2 dokumen						1					1	
											f	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Perkada RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Perkada RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan	Jumlah laporan	2 laporan						1					1	
											g	Penyampaian Perkada RKPD kepada SKPD untuk Penyempurnaan Perumusan Rancangan Akhir Renja SKPD	Terlaksananya Penyampaian Perkada RKPD kepada SKPD untuk Penyempurnaan Perumusan Rancangan Akhir Renja SKPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen						1					1	
											h	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi	Jumlah Dokumen	2 dokumen						1					1	
											i	Penyampaian Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD	Terlaksananya Penyampaian Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD	Jumlah laporan	2 laporan						1					1	

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN															
															1	2	3	4	5	6	7	8	9							
											j	Pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD berdasarkan Hasil Verifikasi oleh Bappeda	Terlaksananya Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD berdasarkan Hasil Verifikasi oleh Bappeda	Jumlah kegiatan	2 kegiatan							1						1		
											k	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD yang sudah disempurnakan berdasarkan Hasil Verifikasi ke Bappeda	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD yang sudah disempurnakan berdasarkan Hasil Verifikasi ke Bappeda	Jumlah kegiatan	2 kegiatan							1						1		
											i	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD oleh Bappeda kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD oleh Bappeda kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada	Jumlah laporan	2 laporan							1						1		
								tersediannya dokumen RKPDP 2021 dan RKPDP Perubahan 2020 kab. Balangan	2 dokumen			a	Penyusunan tim penetapan RKPDP	Terbentuknya tim penetapan RKPDP	Jumlah SK Tim	1 sk	1													
											b	Penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPDP	Tersusunnya dokumen Rancangan Akhir RKPDP	Jumlah Dokumen	1 dokumen				1											
											c	Penyampaian Rancangan Akhir RKPDP Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama SKPD	Tersusunnya Rancangan Akhir RKPDP Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama SKPD	Jumlah laporan	2 laporan							1					1			
											d	Penyampaian Rancangan Perkada RKPDP Kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk dilakukan Fasilitasi Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPDP	Terlaksananya Penyampaian Rancangan Perkada RKPDP Kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk dilakukan Fasilitasi Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPDP	Jumlah Dokumen	2 dokumen							1				1				

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan baik	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan SKPD yg baik dan tepat waktu	2 kegiatan	160,269,000													
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		jumlah Dokumen evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah	2 dokumen	160,269,000	a	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD & DAK Kab. Balangan	Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD & DAK Kab. Balangan	Jumlah SK Tim	1 sk			1					
										b	Pengumpulan bahan dan data laporan secara berkala	Terkumpulnya bahan dan data laporan secara berkala	Jumlah bahan dan Data	4 berkas			1		1			
										c	Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan	Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan	jumlah laporan	4 laporan				1		1		
										d	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala	Jumlah pelaksanaan monitoring	4 triwulan				1		1		
										e	Pembahasan dan penyusunan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Terlaksananya Pembahasan dan penyusunan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan	4 kegiatan				1		1		
					Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya capaian RPJMD bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.	Persentase capaian program prioritas RPJMD bidang ekonomi dan fisik prasarana (Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	95%	2,514,142,900			Persentase konsistensi dan keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah; Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi dan keselarasan antara perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah; Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100; 60 persen								

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik & tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6	1,014,143,000													
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	jumlah bahan rancangan RKPD Sub bidang pemerintahan (Ranwal RKPD Tahun n dan perubahan RKPD Tahun berjalan Garis koordinasi sub bidang)	2 bahan	93,410,000	1	Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD)	Tersedianya Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD)	Jumlah laporan orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD	2	1				1			
											2	Penyiapan data dan informasi pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan data pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2	1				1			
											3	Pelaksanaan rapat koordinasi penyampaian ranwal RKPD kepada SKPD	Tersedianya rapat koordinasi penyampaian ranwal RKPD kepada SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD)	2	1				1			
											4	Analisis BAB II RKPD	Tersedianya BAB II RKPD	Jumlah bahan BAB II RKPD	2	1				1			
											5	Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Tersedianya rancangan awal RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Jumlah bahan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	2			1		1			
											6	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Tersedianya rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Jumlah bahan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	2					1	1		

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN											
														1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya verifikasi Renja SKPD Sub bidang pemerintahan dan aparatur	jumlah dokumen renja yang diverifikasi sub bidang pemerintahan (Dokumen renja SKPD Tahun 2021 dan Dokumen perubahan renja SKPD Tahun 2020)	2 dokumen	107.700.000	1	Penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Terlaksananya verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Jumlah verifikasi dokumen rancangan awal Renja murni dan perubahan SKPD	34				17	17						
										2	Penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renja SKPD	Jumlah verifikasi dokumen rancangan akhir Renja murni dan perubahan SKPD	34					17	17					
										3	Penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD	Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renstra SKPD	Jumlah verifikasi dokumen Renstra	17									17		
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan aparatur	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPDP Sub bidang pemerintahan	4 dokumen	141.903.000	1	Menghimpun data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Terhimpunnya data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Jumlah Laporan	85	17			17				17			
										2	Menganalisa capaian kinerja SKPD pertriwulan	Terlaksananya analisa capaian kinerja SKPD pertriwulan	Jumlah Laporan	85	17			17				17			
										3	Melaksanakan monitoring kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5	1			1				1			

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN										
														1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Rancangan RKPD Sub Bidang pembangunan manusia (Ranwal RKPD Tahun n dan perubahan RKPD Tahun berjalan garis koordinasi sub bidang)	2 dokumen	286,123,000	1	Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan	40	8				8			8		
										2	Menghimpun data dan laporan koordinasi Rancangan Awal SKPD	Terpenuhinya data dan laporan koorinasi Ranwal SKPD Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan	2							1			
										3	Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Garis koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen dan data yang terverifikasi pada SKPD	Jumlah Dokumen	2							1			
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		jumlah dokumen yang diverifikasi sub bidang pembangunan manusia (dokumen renja SKPD Tahun 2021 dan dokumen perubahan renja SKPD Tahun 2020)	2 dokumen	156,026,000	1	Penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Terlaksananya verifikasi Ranwal Renja SKPD	Jumlah Laporan	20	4				4			4		
										2	Penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD	Jumlah Laporan	10							10			
										3	Penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD	Jumlah Dokumen	2							1			

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN											
														1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya verifikasi Renja SKPD Sub bidang Dunia Usaha	jumlah dokumen renja yang diverifikasi sub bidang dunia usaha (dokumen renja SKPD Tahun 2021 dan dokumen perubahan renja SKPD Tahun 2020)	2 dokumen	40,000,000	1	Penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Terlaksananya verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Jumlah verifikasi dokumen rancangan awal Renja murni dan perubahan SKPD	8				4	4						
										2	Penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renja SKPD	Jumlah verifikasi dokumen rancangan akhir Renja murni dan perubahan SKPD	8					4	4					
										3	Penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD	Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renstra SKPD	Jumlah verifikasi dokumen Renstra	4							4				
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang Dunia Usaha	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sub bidang dunia usaha	4 dokumen	34,000,000	1	Menghimpun data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Terhimpunnya data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Jumlah Laporan	16				4			4				
										2	Menganalisa capaian kinerja SKPD pertriwulan	Terlaksananya analisa capaian kinerja SKPD pertriwulan	Jumlah Laporan	16				4			4				
										3	Melaksanakan monitoring kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4				1			1				
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RPKD)		rancangan awal RPKD Sub bidang pertanian dan ketahanan pangan (ranwal RPKD Tahun n dan perubahan RPKD Tahun berjalan)	2 bulan	101,700,000	1	Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RPKD dan RPJMD	Terlaksananya Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RPKD dan RPJMD	Jumlah laporan orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RPKD dan RPJMD	2	1						1				

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	SASARAN RENCANA AKSI	INDIKATOR RENCANA AKSI	TARGET RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN													
														1	2	3	4	5	6	7	8	9					
											d	Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Kerja SPKD Garis Koordinasi Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Triwulan 3 / semester II Tahun 2021	Terlaksananya Monev Capaian Renja SKPD Triwulan 3/semester II Tahun 2021. Bidang Ekofispra	Laporan Capaian Renja SKPD Triwulan 3/semester II Tahun 2021 Bidang Ekofispra yang dievaluasi	13 laporan evaluasi										13		

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I										KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8
			1 sk			1 SK						
				4 bin			4 bin					
							2 dok					
				1 Notulen			1 Notulen					
				45 bhn								
							1 dok			1 Dok		
			1 SK									

Tercapai , telah disusun 2 SK Tim yaitu SK Tim Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2022 dan Renstra tahun 2021-2026

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tercapai, terkumpulnya 8 bahan dr masing2 bidang utk penyusunan renja murni

Bagian Perencanaan dan Keuangan

tercapai, Tersusunnya LKJ bappeda

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tercapai,dilaksanaknrrapat utk penyusunan rka murni dan perubahan

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tercapai,tersedianya sebanyak 45 pra rka

Bagian Perencanaan dan Keuangan

tercapai 2 RKA

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tercapai , telah disusun 1 SK Tim penyusun laporan kinerja Bappeda

Bagian Perencanaan dan Keuangan

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				8 bhn									Tercapai, 8 bahan terdiri dari data pendukung LKIP,LPPD& LKPJdari masing masing seksi dan bagian	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				3 Dok									Tercapai, 3 dokumen Laporan Kinerja yaitu dokumen LKIP,LPPD & LKPJ Bappeda Tahun 2020	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				3 lap									tercapai, teraploudnya dokumen LKJ Bappeda 2020 di E SAKIP REVIU Menpan dan Laporan LKPJ, LPPD Bappeda tercapai pada Laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,terbayarnya gaji dan TPP pegawai Bappeda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	2												Belum tercapai	Bagian Perencanaan dan Keuangan
							2						Tercapai, Tersusunnya laporan keuangan semesteran bappeda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				55stel									Tercapai, tersedianya baju sasirangan pegawai bappeda	bagian umum & kepegawaian

10	11	12	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I									KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai sebanyak 9 bulan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bagian umum & kepegawaian
		2	1							1				Tercapai,sebanyak 9 bulan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bagian umum & kepegawaian
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan Tersedianyabarang cetakan dan penggandaan Bappeda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan Terlaksanya perjalanan dinas ke desa dan ke kecamatan	Bagian Perencanaan dan Keuangan

10	11	12	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I									KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah, luar provinsi dan luar daerah dalam provinsi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai,sebanyak 9 bulan Kantor Bappeda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1 dok														Belum tercapai	bagian umum & kepegawaian
1 pkt														Belum tercapai	bagian umum & kepegawaian
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai , sebanyak 6 bulan Terbayarnya rekening listrik, air dan wifie Kantor bappeda	bagian umum & kepegawaian
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai , sebanyak 9 bulan Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja	bagian umum & kepegawaian
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai , sebanyak 9 bulan Terlaksananya kegiatan kebersihan dan peralatann kebersihan	bagian umum & kepegawaian

10	11	12	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I									KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai , sebanyak 9 bulan Tersedianya alat tulis kantor bappeda	bagian umum & kepegawaian	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai , sebanyak 9 bulan Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bagian umum & kepegawaian	
		25%			25%				25%				25%	Tercapai , sebanyak 75%	bagian umum & kepegawaian
											1		tercapai	Sub bidang Perencanaan & penganggaran	

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				1									Tercapai, Terkumpulnya bahan dan data forum konsultasi publik RKPD Tahun 2022	Bagian perencanaan makro

10	11	12	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I									KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					1								Tercapai, Tersusunnya laporan pelaksanaan forum konsultasi publik (RKP&RPJMD)	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKP Tingkat Kecamatan	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, terbentuknya Tim kompilasi musrenbang RKP	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Musrenbang RKP Tingkat Kecamatan	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Tersusunnya Hasil Musrenbang RKP Tingkat Kecamatan	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Forum SKPD/ Lintas SKPD (Pra Musrenbang RKP) untuk Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terkumpulnya Bahan dan Data Dukung Pelaksanaan Musrenbang RKP Tingkat Kabupaten	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Musrenbang RKP Tingkat Kabupaten	Bagian perencanaan makro
						1							Tercapai, Tersusunnya Hasil Musrenbang RKP Tingkat Kabupaten	Bagian perencanaan makro

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					1								Tercapai, Terbentuknya tim penyusun RPJMD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Tersusunnya dokumen Draf Rancangan Awal RPJMD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Tersusunnya Data Hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RPJMD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terlaksananya Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada Bupati	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Terbentuknya tim penyusun RKPD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Tersusunnya dokumen Draf Rancangan Awal RKPD	Bagian perencanaan makro
					1								Tercapai, Tersusunnya Data Hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD	Bagian perencanaan makro

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				1									Tercapai, Terlaksananya Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPD	Bagian perencanaan makro
				1									Tercapai, Terlaksananya Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD	Bagian perencanaan makro
				1									Tercapai, Terlaksananya Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati	Bagian perencanaan makro
				1									Tercapai, Tersusunnya Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD	Bagian perencanaan makro
				1									Tercapai, Terlaksananya Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD	Bagian perencanaan makro
		1											Tercapai, Terbentuknya tim penetapan RKPD	Bagian perencanaan makro
													Belum Tercapai	Bagian perencanaan makro
							1			1			Tercapai	Bagian perencanaan makro

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
							1			1			Tercapai	Bagian perencanaan makro
							1			1			Tercapai	Bagian perencanaan makro
							1			1			Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
							1			1			Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1		Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1		Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								1			1	Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1	Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1	Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
			1									Tercapai, Terbentuknya tim penetapan RKPD	Bagian perencanaan makro
						1						Tercapai 1 Laporan	Bagian perencanaan makro
							1				1	Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
							1				1	Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
							1			1			Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
							1			1			Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
							1			1			Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1		Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1		Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1		Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
								1			1		Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								1			1	Tercapai 2 Laporan	Bagian perencanaan makro
			1									Tercapai, terbentuknya tim penyusun SIPD dan kelompok kerja SIPD kab. Balangan TA 2020	Sub bidang perencanaan & anggaran
		1										Belum tercapai	Sub bidang perencanaan & anggaran
		1										Belum tercapai	Sub bidang perencanaan & anggaran
			1									Tercapai, terbentuknya tim penyusun OVOD kab. Balangan TA 2021	Sub bidang perencanaan & anggaran
				1	1							Tercapai, Terlaksananya workshop OVOD 2 tahap	Sub bidang perencanaan & anggaran
		1										Belum tercapai	Sub bidang perencanaan & anggaran
1												Belum tercapai	Sub bidang Pengendalian
1												Belum tercapai	Sub bidang Pengendalian

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			1					1					Tercapai, Terlaksananya Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD)	Sub bidang pemerintahan & aparatur
			1					1					Tercapai, Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sub bidang pemerintahan & aparatur
			1					1					Tercapai, Terlaksananya rapat koordinasi penyampaian ranwal RKPD kepada SKPD	Sub bidang pemerintahan & aparatur
			1					1					Tercapai, Tersedianya BAB II RKPD	Sub bidang pemerintahan & aparatur
					1			1					Tercapai, Tersedianya rancangan awal RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Sub bidang pemerintahan & aparatur
								1	1				Tercapai, Tersedianya rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Sub bidang pemerintahan & aparatur

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						17		17					Tercapai, Terlaksananya verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Sub bidang pemerintahan & aparatur
								17	17				Tercapai, Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renja SKPD	Sub bidang pemerintahan & aparatur
									17				Belum tercapai	Sub bidang pemerintahan & aparatur
17	17	17	17			17			17				Tercapai, Terhimpunnya data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Sub bidang pemerintahan & aparatur
17	17	17	17			17			17				Tercapai, Terlaksananya analisa capaian kinerja SKPD pertriwulan	Sub bidang pemerintahan & aparatur
1		1	1			1			1				Tercapai, Terlaksananya monitoring kinerja SKPD	Sub bidang pemerintahan & aparatur

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8		8	8				8			8			Tercapai, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Sub bidang Pendidikan & kesehatan
		1					1						Tercapai, Terpenuhinya data dan laporan koorinasi Ranwal SKPD Garis Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	Sub bidang Pendidikan & kesehatan
		1						1					Tercapai, Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen dan data yang terverifikasi pada SKPD	Sub bidang Pendidikan & kesehatan
4		4	4				4			4			Tercapai, Terlaksananya verifikasi Ranwal Renja SKPD	Sub bidang sosial & pemerinathan desa
								10					Tercapai, Terlaksananya verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD	Sub bidang sosial & pemerinathan desa
		1						1					Tercapai, Terlaksananya Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD	Sub bidang sosial & pemerinathan desa

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
10		10	10				10			10			Tercapai, Terpenuhi data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Sub bidang sosial & pemerinathan desa
		10		10				10					Tercapai, Terpenuhi data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Sub bidang sosial & pemerinathan desa
		10		10				10					Tercapai, Terpenuhi data dan terlaksananya monitoring kinerja SKPD	Sub bidang sosial & pemerinathan desa
			1										Tercapai, Terlaksananya Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD	Sub bidang dunia usaha
			1										Tercapai, Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Sub Bidang Dunia Usaha	Sub bidang dunia usaha
			1										Tercapai, Terlaksananya rapat koordinasi penyampaian ranwal RKPD kepada SKPD	Sub bidang dunia usaha
			1										Tercapai, Tersedianya BAB II Ranwal RKPD	Sub bidang dunia usaha
								1	1				Tercapai, Tersedianya rancangan awal RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Sub bidang dunia usaha

10	11	12	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I									KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						4		4					Tercapai, Terlaksananya verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Sub bidang dunia usaha
								4	4				Tercapai, Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renja SKPD	Sub bidang dunia usaha
									4				Belum Tercapai	Sub bidang dunia usaha
4		4				4			4				Tercapai, Terhimpunnya data dan laporan monitoring SKPD pertriwulan	Sub bidang dunia usaha
4		4				4			4				Tercapai, Terlaksananya analisa capaian kinerja SKPD pertriwulan	Sub bidang dunia usaha
1		1				1			1				Tercapai, Terlaksananya monitoring kinerja SKPD	Sub bidang dunia usaha
			1						1				Tercapai, Terlaksananya Orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim RKPD dan RPJMD	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan

10	11	12	PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I									KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			1					1						Tercapai, Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
			1					1						Tercapai, Terlaksananya rapat koordinasi penyampaian ranwal RKPD kepada SKPD	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
			1					1						Tercapai, Tersedianya BAB II Ranwal RKPD	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
								1	1					Tercapai, Tersedianya rancangan awal RKPD berdasarkan hasil konsultasi publik	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
						4		4						Tercapai, Terlaksananya verifikasi rancangan awal Renja SKPD	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
								4	4					Tercapai, Terlaksananya verifikasi rancangan akhir Renja SKPD	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
									4					Tercapai	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
													Belum Tercapai	Sub bidang pertanian & ketahanan pangan
		1		1				1				1	Tercapai, Menganalisa capaian kinerja SKPD per triwulan	Sub bidang pertanian & ketahanan
1		1			1				1				Tercapai,	Sub bidang pertanian & ketahanan
				1									Tercapai, Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
				1									Tercapai, Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
													Belum Tercapai	Sub bidag fisik & Prasarana

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I										KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)			
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9	
						1							Tercapai, Terlaksananya verifikasi Rancangan Renja dan Pra RKA Tahun 2021 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
			13										Tercapai, Terlaksananya evaluasi capaian kinerja SKPD tahun 2020 garis koordinasi Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
						13							Tercapai, Terlaksananya Monev Capaian Renja SKPD Triwulan I Tahun 2021 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
									13				Tercapai	Sub bidag fisik & Prasarana
									13				Tercapai	Sub bidag fisik & Prasarana
			1										Tercapai, Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			1										Tercapai, Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
						1							Tercapai, Tersusunnya Data akomodir usulan Musrenbang Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2021	Sub bidag fisik & Prasarana
							3						Tercapai, Terlaksananya verifikasi Rancangan Renja dan Pra RKA Tahun 2021 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
			13										Tercapai, Terlaksananya evaluasi capaian kinerja SKPD tahun 2020 garis koordinasi Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
						13							Tercapai, Terlaksananya Monev Capaian Renja SKPD Triwulan I Tahun 2021 Gakor Bidang Ekofispra	Sub bidag fisik & Prasarana
									13				Tercapai	Sub bidag fisik & Prasarana

PELAKSANAAN RENCANA AKSI TRIWULAN I												KETERANGAN	PENAGGUNG JAWAB (BAGIAN)	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									13				Tercapai	Sub bidag fisik & Prasarana

Paringin, Juli 2021
 Plt. Kepala Bappeda,

H. Rakhmadi Yusni, S. Sos, M.AP
 NIP. 19701207 199503 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG)**
- 2. Tugas Pokok** : Membantu Bupati dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3. Fungsi** : Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan administrasi badan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	1.Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Bahwa Capaian target Pembangunan Daerah dalam RPJMD harus menjadi target yang harus tercapai	Capaian target Pembangunan Daerah dalam RPJMD dapat terealisasi dan tercapai sesuai Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	$= 50\% * ((25\% * (\% \text{keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD}) + (25\% * (\% \text{keselarasan muatan RENJA dengan RKPD})) + (30\% * (\% \text{keselarasan muatan RKA dengan RENJA}) + (20\% * (\% \text{keselarasan muatan RKPD Kabupaten dengan RKPD Propinsi}))$ Integrasi=%keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD, Integrasi=%keselarasan muatan RENJA dengan RKPD, Sinkronisasi=%keselarasan muatan RKA dengan RENJA, Sinergi = % keselarasan muatan RKPD Kabupaten dengan RKPD Propinsi	Bappedalitbang	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja SOPD
2	Meningkatnya inovasi daerah	2.Indeks inovasi daerah	bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	= hasil penilaian dari kementerian	Bappedalitbang	Renja dan RKA SOPD

3		3.Predikat LKIP BAPPEDA	Bahwa kinerja SKPD semakin terukur dan optimal	Sesuai dengan tugas dan fungsi bappeda untuk mengelola rencana dan laporan kinerja SKPD	<i>Hasil Penilaian LKIP oleh inspektorat</i>	Bappeda	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, LKIP Kabupaten, LKIP SOPD
---	--	-------------------------	--	---	--	---------	--

Paringin, Agustus 2021
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Rakhmadi Yusni.S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690324 199703 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- 1. Instansi** : **BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**
- 2. TugasPokok** : Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan asset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaain.
- 3. Fungsi** : **1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Bappeda**
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan bappeda.
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup bappeda
4. Penyusunan program,koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset lingkup bappeda.
5. Penyusunan program,koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga lingkup bappeda
6. Penyusunan program,koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup bappeda
7. Penyusunan program,koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup bappeda

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	bahwa administrasi perkantoran semakin teratur dan lancar	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk melayani administrasi internal SKPD	Dengan membagikan kuesioner pada karyawan /karyawati lingkup Bappeda	Kasubbag Umpeg	Bappeda
2	Terpenuhinya sarana & prasarana	Sarana dan prasarana kerja dalam kondisi baik	bahwa sarana prasarana kantor cukup memadai dalam menunjang kinerja Bappeda	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mendukung kelancaran bekerja	= jumlah aset yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah total aset yang dimiliki	Kasubbag Umpeg	Renja dan RKA SOPD

3	Meningkatnya Kinerja Fisik dan Keuangan	Nilai SAKIP Bappeda	Bahwa kinerja SKPD semakin terukur dan optimal	Sesuai dengan tugas dan fungsi bappeda untuk mengelola rencana dan laporan kinerja SKPD	<i>Hasil Penilaian LKIP oleh inspektorat</i>	Kasubbag perencanaan & keuangan	LKIP Kabupaten, LKIP SOPD
---	---	---------------------	--	---	--	---------------------------------	---------------------------

Paringin, April 2017
Sekretaris Bappeda Kabupaten Balangan

Rohimat, S. IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BIDANG EKONOMI DAN FISIK PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang ekonomi dan fisik prasarana.
- 3. Fungsi** :
1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Renstra perangkat daerah dan Rencana kerja Perangkat daerah.
 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten.
 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten.
 6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional.
 7. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama anatar daerah.
 7. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ekonomi dan fisik parasarana lebih Berkualitas	Persentase Renstra dan Renja SKPD Bidang ekonomi dan Fisik prasarana dengan kriteria baik	bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	jumlah SKPD dengan Renstra dan Renja baik dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Bidang ekonomi dan fisik prasarana	Bappeda

Paringin, April 2017

Kepala Bidang Ekonomi fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Balangan

Resty Fauriana, ST, MT

Pembina Muda

NIP. 19820417 200604 2 016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PENGENDALIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan makro, pengendalian serta anggaran dan pembiayaan.
- 5. Fungsi** :
1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa dan pengkajian kewilayahan.
 3. Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
 4. Pengintegrasian dan harmonisasi program – program pembangunan di daerah
 5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sinkronisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah
 4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
 7. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
 8. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
 9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 11. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 12. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

6. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran		bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	jumlah SKPD dengan Renstra dan Renja baik dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Bidang ekonomi dan fisik prasarana	Bappeda
2	Capaian kinerja Makro Daerah	Prosentase capaian makro daerah					
3	. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Prosentase capaian ketersediaan data & informasi pembangunan daerah					

Paringin, April 2017
Kepala Bidang Perencanaan Makro & Pengendalian Bappeda Kabupaten Balangan

Fakhriyanto, ST, MT
Pembina Muda
NIP. 19820417 200604 2 016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan makro, pengendalian serta anggaran dan pembiayaan.
- 7. Fungsi** :
1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
 2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa dan pengkajian kewilayahan.
 3. Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
 4. Pengintegrasian dan harmonisasi program – program pembangunan di daerah
 5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
 3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sinkronisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah
 4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
 7. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
 8. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
 9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 11. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 12. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

8. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran		bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	jumlah SKPD dengan Renstra dan Renja baik dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Bidang ekonomi dan fisik prasarana	Bappeda
2	Capaian kinerja Makro Daerah	Prosentase capaian makro daerah					
3	. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Prosentase capaian ketersediaan data & informasi pembangunan daerah					

Parangin, April 2017

Kepala Bidang Perencanaan Makro & Pengendalian BappedaKabupatenBalangan

Saefudin.

Pembina Muda

NIP. 19820417 200604 2 016